



## BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH

**2017**



# KATA PENGANTAR



**Dengan Kerja Bersama,  
Bapenda Jawa Timur  
Mandiri & Berdaya Saing  
Melalui Penguatan PAD  
& Pelayanan Publik Yang  
Berkualitas.**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dapat disusun, sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran.

Peran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tercermin dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 sebagai bagian dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi

Gubernur Jawa Timur. Agenda prioritas ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur memuat 1 (satu) sasaran strategis yang pencapaiannya didukung oleh serangkaian rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam muncurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal.

Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan, diupayakan ditetapkan secara lebih ambisius dan menantang. Kondisi perekonomian domestik maupun internasional pada tahun 2017 yang cukup bergejolak merupakan tantangan bagi pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan mendorong dikeluarkannya berbagai kebijakan untuk mengamankan kondisi fiskal.

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan secara umum target kinerja di tahun 2017 telah terlampaui, meskipun masih terdapat beberapa target kinerja yang masih memerlukan sejumlah perbaikan inisiatif untuk mendongkrak kinerja di tahun berikutnya.

Saya mengajak seluruh komponen organisasi untuk menjadikan sistem pengelolaan kinerja sebagai instrumen manajemen yang efektif bukan sekadar

pemenuhan formalitas. Seluruh IKU dan target IKU yang ditetapkan harus merefleksikan tujuan dan ambisi dalam bekerja untuk memberikan upaya terbaik bagi organisasi dan Provinsi Jawa Timur.

Saya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah berkontribusi untuk organisasi ini. Saya melihat masih terdapat bagian-bagian yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Saya mendorong agar seluruh pejabat dan pegawai bersama-sama untuk terus menerus mengupayakan perbaikan bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sehingga mampu Mandiri & Berdaya Saing Melalui Penguatan PAD serta mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas.

Untuk mewujudkan hal tersebut kedepan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur harus sangat visioner, taktis, dan iT minded untuk menemukan cara-cara modern berbasis information technology (iT) guna menciptakan bentuk-bentuk baru layanan perpajakan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur ditantang menemukan terobosan demi terobosan kebijakan inovatif. Tujuannya untuk memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan umpan balik bagi organisasi ini untuk mendorong peningkatan kinerja.

#### ***Wassalaamu'alaikum Wr.Wb***

Surabaya, 15 Pebruari 2018  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
  
BEBEK YUDI MARZONO, SH., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661031 199011 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
RINGKASAN EKSEKUTIF

i  
iv  
v

## 01

---

PENDAHULUAN	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TENTANG BAPENDA PROV. JATIM	5
	Profil dan Sejarah Singkat	5
	Tugas Pokok dan Fungsi	8
	Struktur Organisasi	9
	Sumber Daya	11
	Strategic Issue	13

## 02

---

PERENCANAAN STRATEGIS	A. PERENCANAAN STRATEGIS	15
	Framework Renstra	15
	B. PERJANJIAN KINERJA	19

## 03

---

AKUNTABILITAS KINERJA	A. CAPAIAN KINERJA	21
	Pengukuran Kinerja	21
	Analisa Capaian Kinerja	22
	B. REALISASI ANGGARAN	35
	Cost per Outcome	40
	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	41
	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan akhir periode Renstra	43

## 04

---

PENUTUP	A. KESIMPULAN	44
	B. LANGKAH SELANJUTNYA	45

# LAMPIRAN

- A. PERJANJIAN KINERJA
- B. PENGUKURAN KINERJA 2017
- C. DOKUMENTASI PENGHARGAAN TAHUN 2017
- D. MATRIK RENSTRA

## TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Data Personil Berdasarkan Golongan Ruang
<b>Tabel 1.2</b>	Berdasarkan Tingkat Pendidikan
<b>Tabel 1.3</b>	Sarana dan Prasarana
<b>Tabel 2.1</b>	Tujuan & Sasaran
<b>Tabel 3.1</b>	Pengukuran Kinerja
<b>Tabel 3.2</b>	Tingkat Capaian Kinerja
<b>Tabel 3.3</b>	Perbandingan Penerimaan PAD
<b>Tabel 3.4</b>	PAD (yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur)
<b>Tabel 3.5</b>	Persentase Rasio PAD
<b>Tabel 3.6</b>	Persentase Penurunan Piutang Pajak
<b>Tabel 3.7</b>	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017
<b>Tabel 3.8</b>	Rekapitulasi & Capaian Kinerja IKU 5
<b>Tabel 3.9</b>	Data Pengguna Layanan Samsat Unggulan
<b>Tabel 3.10</b>	Komposisi Belanja Bapenda Prov. Jatim TA. 2017
<b>Tabel 3.11</b>	Realisasi Belanja Langsung
<b>Tabel 3.12</b>	Alokasi Per Sasaran Pembangunan
<b>Tabel 3.13</b>	Pencapaian Kinerja dan Anggaran
<b>Tabel 3.14</b>	Efisiensi Penggunaan Sumber daya
<b>Tabel 3.15</b>	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode RPJMD

## GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Wilayah Kerja Bapenda Prov. Jatim
<b>Gambar 1.2</b>	Struktur Organisasi Bapenda Prov. Jatim
<b>Gambar 1.3</b>	Struktur Organisasi UPT Bapenda Prov.Jatim

## GRAFIK

<b>Grafik 1.1</b>	Komposisi Gender
<b>Grafik 3.1</b>	Rasio PAD Bapenda Prov. Jatim terhadap APBD Pemprov Jatim
<b>Grafik 3.2</b>	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2010-2017 untuk IKU 5
<b>Grafik 3.4</b>	Komposisi Belanja Bapenda Prov. Jatim TA. 2017

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017. Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2017 dan Perjanjian Kinerja 2017 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2017 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2014 – 2019 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, capaian kinerja (*Performance Results*) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2017 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2017.

Sebagai bagian organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas strategis berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang urusan bidang keuangan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur juga tercermin dalam Misi ke 4 (empat) RPJMD Tahun 2014 - 2019 yaitu :

meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Untuk itu dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur menjabarkan 1 (satu) sasaran strategis sebagai rincian atas tujuan tersebut. Yang mana sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud.

Terdapat 6 (enam) indikator kinerja utama beserta targetnya yang ditetapkan sebagai standar kinerja selama tahun 2017. Pencapaian visi dan misi organisasi juga didukung dengan penetapan serangkaian inisiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan sebagai upaya penyempurnaan proses organisasi dan pelayanan publik.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2017, secara keseluruhan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sudah baik dan berhasil dimana Nilai Capaian Kinerja Organisasi (Performance Gap) adalah sebesar 145,48%.

Dari 6 (enam) IKU Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, terdapat 5 (lima) IKU memenuhi ekspektasi, 1 (satu) IKU yaitu “Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah” berstatus belum memenuhi ekspektasi. Ini dikarenakan adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten / Kota ke Pemerintah Provinsi, salah satunya adalah

pendidikan menengah, sehingga jumlah DAU (Dana Alokasi Umum) yang diterima Pemerintah Provinsi lebih besar apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan DAU tersebut tidak dapat diimbangi oleh kenaikan penerimaan PAD yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur juga telah melakukan pemantauan atas kegiatan prioritas. Selama tahun 2017, telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk menjamin program prioritas tersebut terlaksana. Pada sisi pengelolaan anggaran, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah merealisasikan penyerapan anggaran TA. 2017 untuk semua jenis belanja sebesar Rp 478.309.310.819,00 atau 87,02% dari total pagu sebesar Rp 549.633.298.830,00.

Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekadar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian *output* serta upaya efisiensi penyerapannya. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur juga telah melakukan sejumlah inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

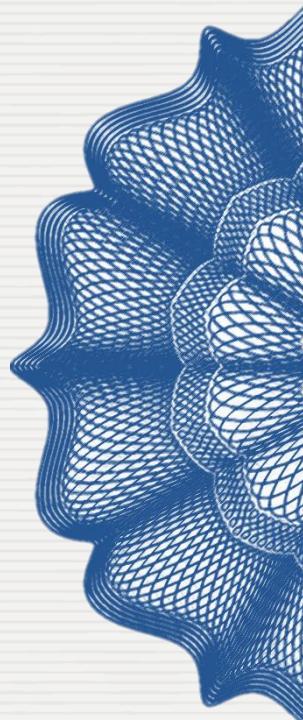
Beberapa *achievement* dalam internal organisasi telah mengantarkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur meraih beberapa penghargaan seperti penghargaan atas :

1. Penghargaan Top 99 inovasi pelayanan publik (sinovik) tahun 2017 untuk KB. Samsat Jombang - Program Jujug Desa;
2. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun (AKIP) 2017 Dengan Predikat Nilai A;
3. Penghargaan terbaik ke-empat Kompetisi Budaya Kinerja Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk KBK. SALES (UPTB Nganjuk)

Perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai inovasi dan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Evaluasi Laporan Kinerja serta Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, internal organisasi secara aktif melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam perencanaan program dan kegiatan.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**



## A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, dituntut selalu melakukan pemberian kinerja. Pemberian kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pertambahan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai perwujudan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan serta sebagai salah satu alat

untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi jawa Timur.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
2. Mendorong Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Jawa Timur terhadap Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

## LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, antara lain :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah dirubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga atas Pembelian Kayu dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur;
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

## B. TENTANG BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

### I. Profil dan Sejarah Singkat



Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam pelaksanaan penghimpunan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

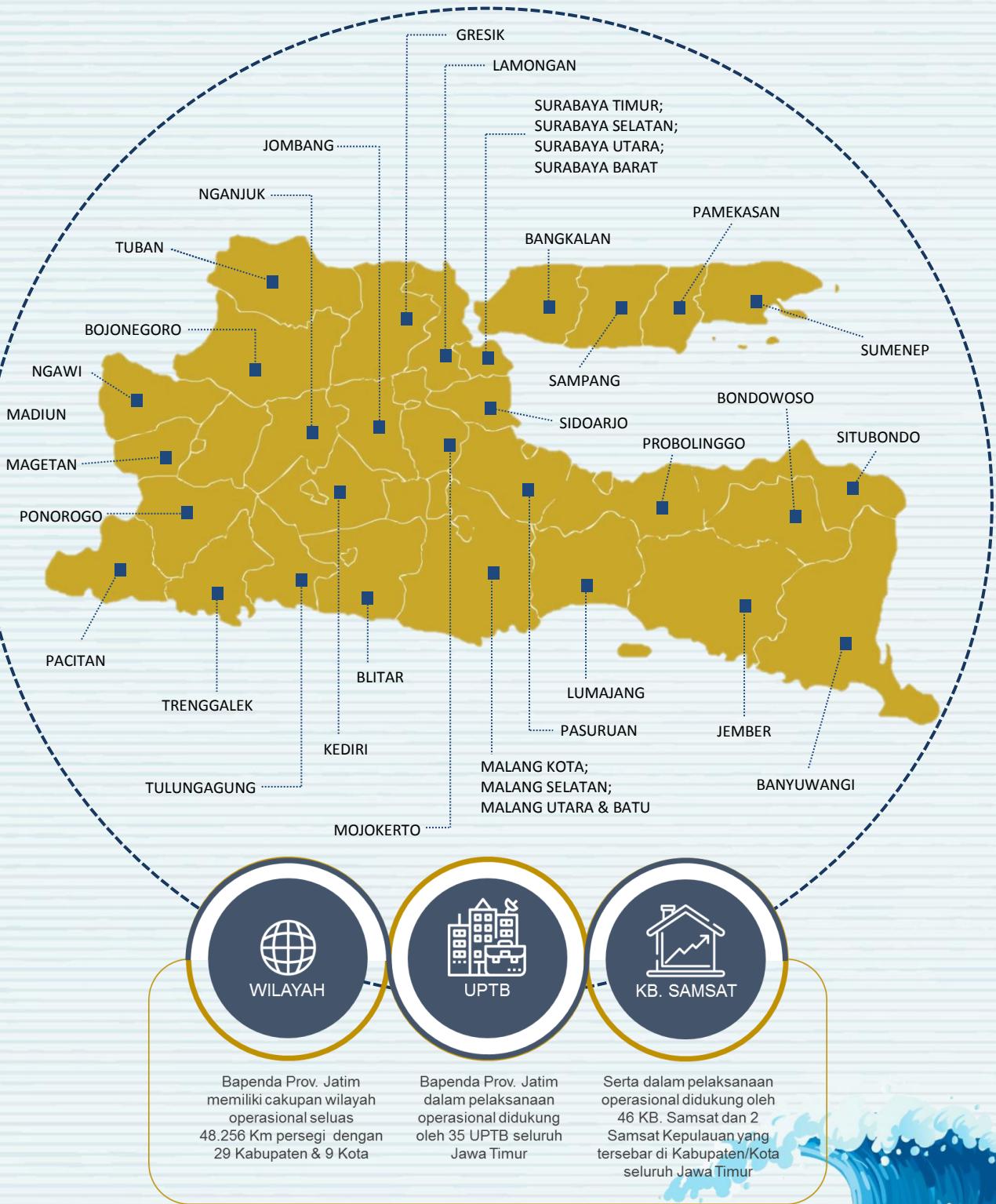
Daerah serta Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Umum Retribusi Daerah, selanjutnya membentuk urusan pajak pada bagian penghasilan Daerah Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Nopember 1960 Nomor: P/361/A/Drh, embrio ini kemudian berkembang dan ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Karet No. 90 Surabaya. Pada tahun 1962, ini merupakan langkah awal kegiatan Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : Des/451/G/28/Drh tanggal 28 Maret 1962, namun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor Des/1205/G/110/Drh tanggal 26 September 1962 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur baru dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1962, tanggal pemberlakuan inilah yang diperingati sebagai Hari Jadi bagi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur.

Proses perubahan lembaga Dinas Pendapatan menyangkut perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan dan peranan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan lebih mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah menjadi suatu potensi yang realistik dan sangat dominan dalam penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan jawa timur.

Proses transformasi berikutnya adalah karena perubahan kewenangan yang diamanatkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dimana bidang keuangan merupakan bagian dari unsur penunjang urusan pemerintahan, sehingga bentuk organisasinya berubah menjadi Badan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka terhitung sejak januari 2017, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

**Gambar 1.1 (Wilayah Kerja Badan Pendapatan Daerah)**



## **II. Tugas Pokok dan Fungsi**

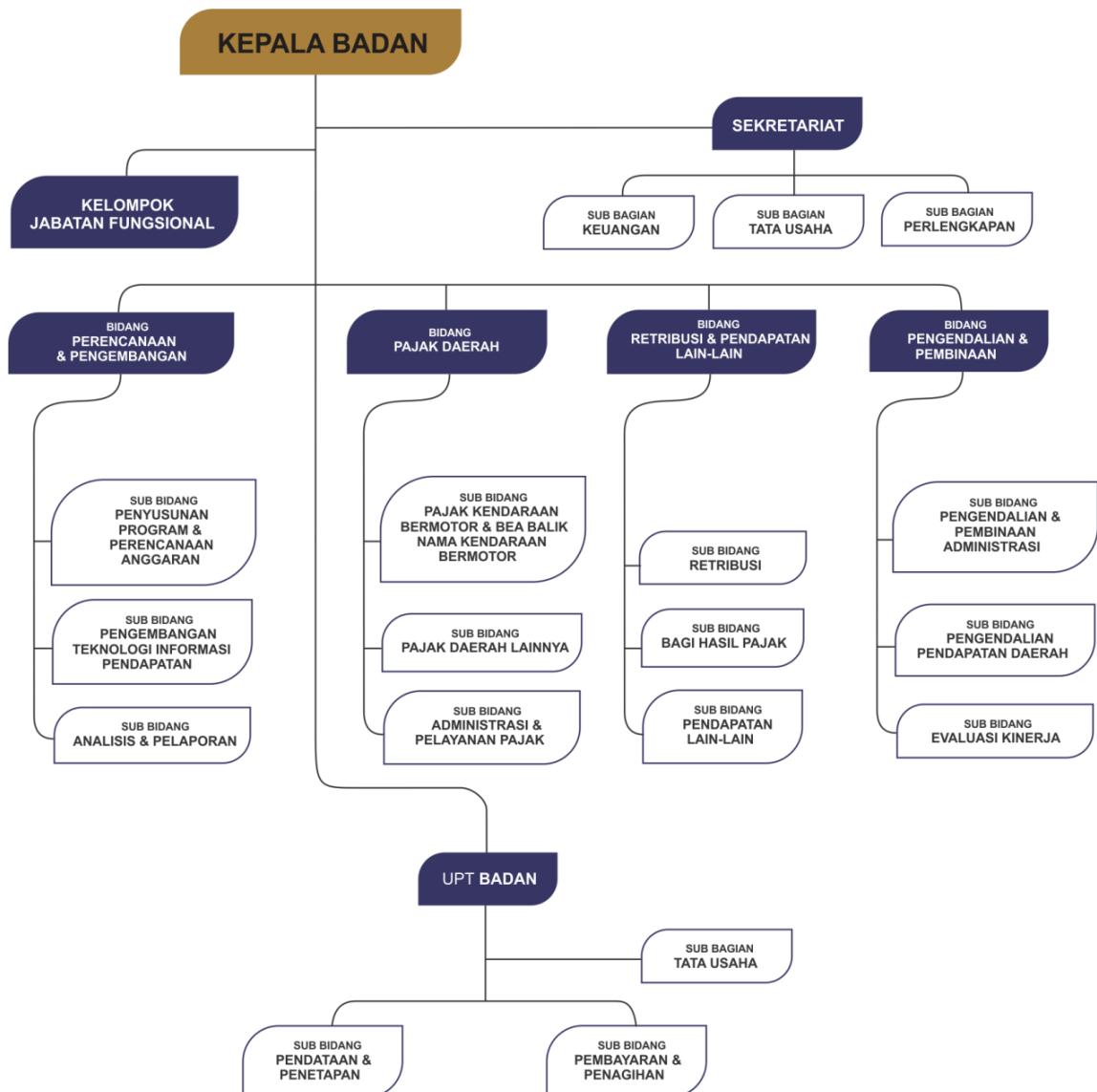
Dalam melaksanakan peran strategis seperti telah diuraikan diatas, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Jawa Timur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 
- **Penyusunan Kebijakan Teknis di bidang keuangan**
  - **Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan**
  - **Pemantauan, evaluasi & pelaporan pelaksanaan tugas Dukungan teknis di bidang keuangan**
  - **Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan**
  - **Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan**

### III. Struktur Organisasi

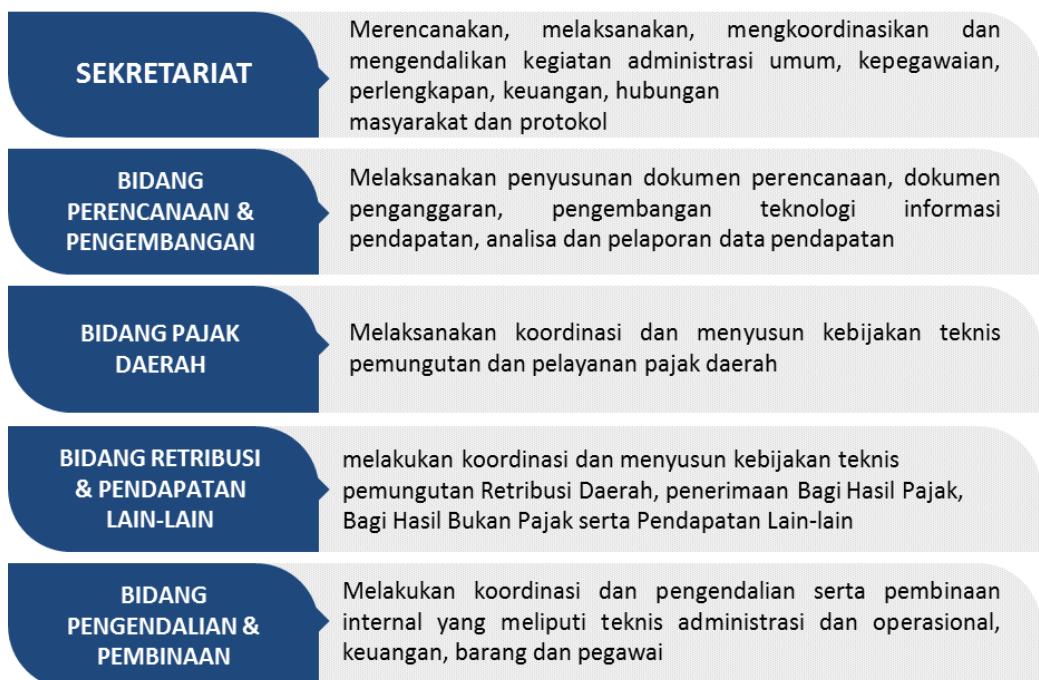
Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam gambar berikut :



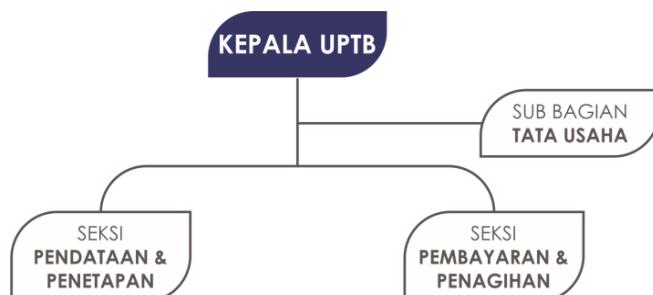
**Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur**

Struktur Organisasi pada Kantor Badan disusun berdasarkan fungsi (*by function*), sebab kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dititikberatkan pada penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan.

Adapun penjabaran tugas Sekretariat dan masing-masing Bidang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :



Sedangkan struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) disusun berdasarkan proses (*by process*) dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja kegiatan operasional dan pelayanan pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan ujung tombak kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan pelayanan pada masyarakat. Berikut gambar Struktur Organisasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur :



**Gambar 1.3 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis  
Badan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur**

Adapun penjabaran tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :



#### IV. Sumber Daya

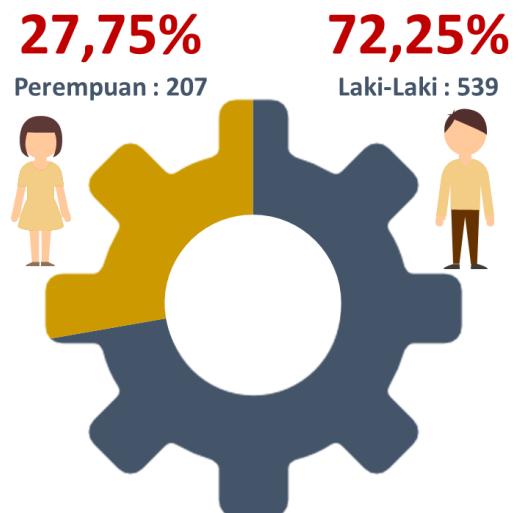
Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2017 sebanyak 746 orang, dengan perincian kondisi riil pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin adalah sebagaimana tabel dibawah

a. Data Personil Berdasarkan Golongan Ruang (Tabel 1.1) :

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya ( IV/d)	1
2	Pembina Tingkat I ( IV/b)	12
3	Pembina (IV/a)	56
4	Penata Tingkat I ( III/d)	102
5	Penata ( III/c)	48
6	Penata Muda Tingkat I ( III/b)	157
7	Penata Muda (III/a)	55
8	Pengatur Tingkat I ( II/d)	12
9	Pengatur (II/c)	186
10	Pengatur Muda Tingkat I ( II/b)	69
11	Pengatur Muda (II/a)	22
12	Juru Tingkat I ( I/d)	5
13	Juru ( I/c)	16
14	Juru Muda Tingkat I ( I/b)	5
<b>JUMLAH</b>		<b>746</b>

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tabel 1.2) dan Komposisi Gender (Grafik 1.1) :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S – 3 (Doctoral)	1
2	S – 2 (Pasca Sarjana)	99
3	S – 1 (Sarjana)	288
4	D-IV	10
5	D-III	31
6	D-II	0
7	D-I	3
8	SLTA	267
9	SLTP	29
10	SD	18
<b>JUMLAH</b>		<b>746</b>



### c. Sarana dan Prasarana

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017**

NO	URAIAN	JUMLAH/UNIT	NILAI (Rp)
1.	Tanah	97 Bidang	188.806.571.112
2.	Peralatan dan Mesin	67.580 Buah/Set	234.879.065.367
3.	Gedung dan Bangunan	220 Buah	119.299.145.629
4.	Jalan, Irigasi & Jaringan	158 Buah	5.318.666.400
5.	Aset Tetap Lainnya	840 Buah/Set	890.665.311
6.	Konstruksi dalam penggerjaan	5 Buah	900.764.500
<b>TOTAL</b>			<b>550.094.878.319</b>

### V. Strategic Issue Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

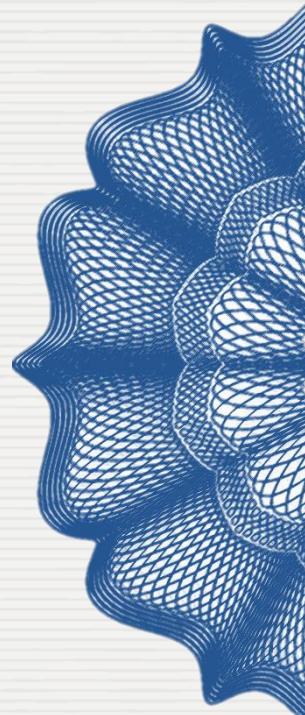
Beberapa isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2017 yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kebutuhan Pendanaan Pembangunan Daerah untuk memenuhi beberapa Program Prioritas Daerah sebagai berikut :
  - a. Pengembangan Program Pemberdayaan UMKM Provinsi Jawa Timur;
  - b. Pengembangan Program Pengentasan Kemiskinan masyarakat Jawa Timur;
  - c. Pengembangan Program Pendidikan;
  - d. Pemenuhan terhadap Peningkatan Kebutuhan Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Kebijakan belanja *money follow program* sehingga belanja program/kegiatan diprioritaskan untuk kegiatan yang mendukung agenda/prioritas nasional maupun regional;

3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien, sesuai dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dan Tuntutan Pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah;
4. Tuntutan terhadap Pemenuhan Kebutuhan akan Sumber Alternatif Pendapatan lain yang memiliki Potensi Besar untuk dikembangkan menjadi sumber Penerimaan Daerah baru, sehingga mengurangi ketergantungan Pendanaan yang berasal dari Penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan secara "*Limitative / Closed List*" oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah yang mudah, cepat, tepat, dan transparan;
6. Penambahan Kapasitas Pendanaan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan yaitu Tambahan Persentase Dana Bagi Hasil Pajak dan Tambahan Obyek Pajak yang di bagi hasilkan (PPh 25/ 29 badan, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPn dan PPnBM), melalui Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

# **BAB 2**

## **PERENCANAAN KINERJA**



# A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana Rencana Strategis tahun 2014-2019 yang ditelah direview dan disahkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 050/478/KPTS/120/2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang Review Rencana Strategis Tahun 2014-2019. Review Renstra 2014-2019 dimaksud adalah menindaklanjuti Peraturan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Selain sebagai bentuk penyesuaian terhadap beberapa perubahan pada pedoman pengelolaan keuangan daerah dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

## Framework RENSTRA

- 2.1. Berikut adalah **Framework Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 :**



### **VISI :**

**Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera dan Berakhlik Melalui Kemandirian Fiskal dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.**



### **MISI :**

**Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Dari visi dan misi tersebut, selanjutnya ditetapkan tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :



**TUJUAN :**

**Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik.**

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur menyusun Sasaran Strategis. Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :



**SASARAN STRATEGIS :**

**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Pelayanan Publik**

Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1 Tujuan & Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);</li><li>2. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah;</li><li>3. Persentase Penurunan Piutang / Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);</li><li>4. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;</li><li>5. Rata-Rata Nilai SKM;</li><li>6. Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Unggulan</li></ul>

Agar Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan Strategi dan Kebijakan Operasional sesuai dengan ketentuan/regulasi oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, pada lingkup internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

## **2.2. STRATEGI & KEBIJAKAN**

Berikut rumusan penetapan *Strategi* oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur :

1. Melakukan Validasi Potensi Pendapatan,
2. Melakukan Validasi Data Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor,
3. Melakukan Validasi Data Wajib Pajak,
4. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara intensif,
5. Mengadakan Pelatihan Sertifikasi SMM ISO 9001:2008,
6. Melaksanakan Validasi Data Pembayaran,
7. Melaksanakan Pelatihan dan Pendidikan Struktural maupun Fungsional dalam rangka Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan. Perumusan Kebijakan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan Strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan.

Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur secara garis besar dapat dibagi dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu Kebijakan dalam bidang Pendapatan Asli Daerah, Kebijakan dalam bidang Pelayanan Publik, Kebijakan dalam bidang Kelembagaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

### **1. Bidang Pendapatan Asli Daerah**

Mengembangkan kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam pengertian bahwa Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan kepada :

- a. Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;

- c. Peningkatan jangkauan dan jaringan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Pengembangan sistem dan prosedur tata cara pemungutan secara transparan dan akuntabel.

## **2. Bidang Pelayanan Publik**

Mewujudkan Pelayanan Publik yang profesional, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pihak lain, dalam pengertian bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui :

- a. Perluasan kapasitas dan fasilitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. Pengembangan metode/prosedur pelayanan agar lebih sederhana dan baku;
- c. Pengembangan kerjasama penyelenggaraan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dengan pihak ketiga;
- d. Pengembangan model layanan jenis baru secara lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- e. Pengembangan kerjasama dengan pihak auditor untuk pelaksanaan audit eksternal dan sertifikasi layanan;
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak eksternal untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat atas layanan Kantor Bersama Samsat.

## **3. Bidang Kelembagaan**

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan berbasis kompetensi dalam pengertian bahwa kebijakan dalam bidang kelembagaan khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional baik kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.

### **2.3. PROGRAM & KEGIATAN**

Program yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 sebanyak 5 (lima) Program. Rincian uraian Kegiatan untuk tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.10 pada Bab III, sedangkan Program-program tersebut antara lain :

### ***Program Prioritas***

1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

### ***Program Penunjang***

2. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;
5. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan.

#### **2.4. RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017**

Dalam penetapan target kinerjanya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur selalu memperhatikan Renja yang merupakan penjabaran atas Renstra. Renja bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. Dalam Renja mengatur mengenai kebijakan umum dan kebijakan operasional untuk setiap program penganggaran yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dalam pelaksanaannya, setiap satuan kerja harus menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bentuk monitoring pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

## **B. PERJANJIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan /



kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

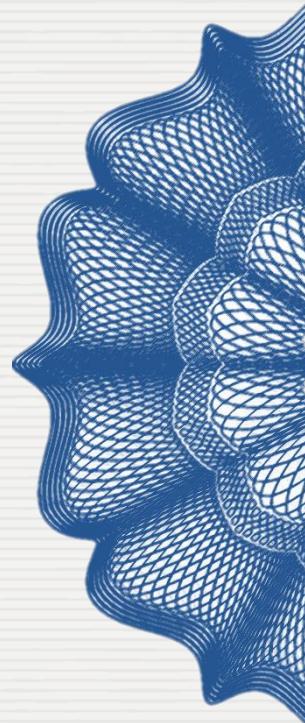
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 merupakan target kinerja tahun ketiga dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019, yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 tersaji sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1 Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah 3 Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor 4 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 5 Rata-rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 6 Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	8,76% 50,00% 10% 86,00% 86,00 45%
Program	Anggaran	Keterangan
1 Pelayanan Perkantoran	Rp 70.464.208.175	APBD
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 77.643.814.028	APBD
3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp 17.547.219.000	APBD
4 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 1.712.617.000	APBD
5 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 36.013.549.627	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 203.381.407.830</b>	

# **BAB 3**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**



# A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

## 3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja (performance Gap) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 diukur dengan cara membandingkan antara target Indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerja (performance Gap) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**

VISI :

Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera dan Berakhlik Melalui Kemandirian Fiskal dan Pelayanan Publik yang Berkualitas

MISI :

Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TUJUAN :

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2017					REALISASI TAHUN 2017					CAPAIAN	KATEGORI
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL		
Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	1,75 %	2,19 %	2,19 %	2,63%	8,76%	3,17%	0,17 %	2,78 %	5,43%	12,34%	140,87%	Sangat Baik
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	50%	50%	50%	50%	50%	46,04%	56,96 %	45,68 %	48,11 %	48,11%	96,22%	Baik
Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	10%	7,34%	4,44 %	6,76 %	13,23 %	31,78% *)	317,80%	Sangat Baik
Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	21%	22%	22%	21%	86%	21,70%	21,02 %	23,77 %	21,89 %	88,37%	102,76%	Sangat Baik
Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,40	86,47	86,93	87,56	86,84	100,98%	Sangat Baik
Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	45%	45%	45%	45%	45%	45,11%	57,60 %	55,95 %	51,41 %	51,41%	114,24%	Sangat Baik

\*) Data Piutang *unaudited*

### 3.2 Analisa Capaian Kinerja



#### SASARAN STRATEGIS :

#### **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik**

Sesuai Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019, terdapat 1 (satu) misi dan 1 (satu) tujuan, serta 1 (satu) sasaran strategis.

Dalam sasaran strategis ini, terdapat 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis serta analisa dari keenam Indikator Kinerja Utama nya, akan diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.2  
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2014 – 2017**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI TAHUN				CAPAIAN
		2014	2015	2016	2017	
Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	8,76%	22,43%	8,51%	2,21%	12,34%	140,87%
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	50,00%	-	61,77%	56,11%	48,11%	96,22%
Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	10,00%	6,94%	41,41%	85,33%	31,78% *)	317,80%
Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	86,00%	-	88,77%	87,88%	88,37%	102,76%
Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat	86,00	88,08%	88,99%	87,28	86,84	100,98%
Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	45%	-	52,76%	49,49%	51,41%	114,24%
<b>RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN KINERJA</b>						<b>145,48%</b>

## 1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sampai dengan akhir Desember 2017 kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur masih diatas target yang ditetapkan. Berikut Kami sajikan Tabel perbandingan penerimaan PAD Tahun 2016 dan Tahun 2017

**Tabel 3.3  
Perbandingan Penerimaan PAD Tahun 2016 & Tahun 2017**

DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2014)	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	SELISIH	%
11.539.074.054.595				
TW I	2.545.084.105.016	3.053.217.335.250	508.133.230.234	19,97%
TW II	3.505.783.819.103	3.527.028.628.344	21.244.809.241	0,61%
TW III	3.270.142.233.506	3.625.455.534.986	355.313.301.480	10,87%
TW IV	3.476.224.722.293	4.170.600.212.446	694.375.490.153	19,97%
<b>TOTAL</b>	<b>12.797.234.879.918</b>	<b>14.376.301.711.026,40</b>	<b>1.579.066.831.108</b>	<b>12,34%</b>

\*Data Realisasi Tahun 2017 setelah dikurangi dengan pendapatan denda pajak & denda retribusi

TARGET IKU 1	REALISASI	CAPAIAN
8,76%	12,34%	140,87%

Dengan rumus :

$$\frac{PAD_n - PAD_{n-1}}{PAD_{n-1}} \times 100\%$$

$PAD_n$  : realisasi PAD tahun berjalan

$PAD_{n-1}$  : realisasi PAD tahun lalu

$$\frac{\text{Realisasi PAD tahun berjalan} - \text{Realisasi PAD tahun lalu}}{\text{Realisasi PAD tahun lalu}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 14.376.301.711.026,40 - \text{Rp } 12.797.234.879.918}{\text{Rp } 12.797.234.879.918} \times 100\% = 12,34\%$$

Dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 1 terealisasi sebesar 12,34% dari target yang ditetapkan yaitu 8,76%, sehingga capaian kinerja (performance gap) masuk dalam kategori **sangat baik**.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pemungutan Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah :

- a. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, pada triwulan IV telah dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan 35 Kab/Kota dalam rangka penggalian potensi penerimaan PAD dari sektor Retribusi jasa Usaha, Sewa dan lain-lain PAD yang sah;
- b. Kegiatan kedua adalah Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah, target yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pemantapan teknis bidang perpajakan yang menghasilkan rumusan Harga Pasaran Umum Kendaraan Bermotor sebagai dasar penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, serta perhitungan perkiraan jumlah objek pajak dalam satu tahun yang terdiri dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor, sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sektor Pajak Air Permukaan dan sektor Pajak Rokok;
- c. Kegiatan yang ketiga adalah Retribusi Tempat Pelelangan, merupakan salah satu sektor retribusi daerah, dimana keluaran yang diharapkan adalah terselenggaranya kegiatan lelang kayu hasil hutan. Sampai dengan triwulan IV telah terlaksana sebanyak 70 kegiatan;
- d. Selanjutnya adalah kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada 35 UPT di Jawa Timur yang dilaksanakan oleh masing-masing UPT, keluaran dari kegiatan ini adalah realisasi penerimaan PAD masing-masing UPT.

Detail realisasi per jenis pungutan (PAD) dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Pendapatan Asli Daerah (yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur) Tahun Anggaran 2017**

JENIS PUNGUTAN	TARGET P-APBD	REALISASI
<b>PKB</b>	<b>5.130.000.000.000,00</b>	<b>5.889.902.148.435,00</b>
<b>BBNKB</b>	<b>3.480.000.000.000,00</b>	<b>3.705.349.480.779,00</b>
<b>PBBKB</b>	<b>2.000.000.000.000,00</b>	<b>2.109.000.178.968,68</b>
<b>PAP</b>	<b>29.000.000.000,00</b>	<b>33.527.009.801,00</b>
<b>PAJAK ROKOK</b>	<b>2.340.000.000.000,00</b>	<b>2.612.928.878.795,00</b>
<b>RET. JASA USAHA</b>	<b>3.572.700.000,00</b>	<b>3.693.081.133,75</b>
<b>PENERIMAAN LAIN-LAIN</b>	<b>18.700.000.000,00</b>	<b>21.900.933.114,00</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>13.001.272.700.000,00</b>	<b>14.376.301.711.026,40</b>

Selain itu dalam rangka Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur berupaya mengembangkan layanan-layanan Samsat Unggulan seperti :

- a. Samsat Drive Thru;
- b. Samsat Payment Point;
- c. Samsat Corner;
- d. Samsat Keliling Mandiri dan 1 Unit Bus Samsat Keliling;
- e. Samsat Link;
- f. e-Samsat Jatim;
- g. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Samsat Jatim;
- h. Mesin Embosser;
- i. Dan layanan terbaru adalah bekerjasama dengan PT. POS INDONESIA;
- j. Serta inovasi-inovasi KB. Samsat terhadap layanan publik dengan berbasis budaya lokal setempat.

## **2. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah**

Terhadap IKU 2 realisasi rasio PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tercapai hanya 48,11% atau turun 1,89%.

Kinerja IKU 2 ini tidak tercapai dikarenakan adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten / Kota ke Pemerintah Provinsi, salah satunya adalah pendidikan menengah, sehingga jumlah DAU (Dana Alokasi Umum) yang diterima Pemerintah Provinsi lebih besar apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan DAU tersebut tidak dapat diimbangi oleh kenaikan penerimaan PAD yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Berikut Kami sajikan Tabel Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah :

**Tabel 3.5  
Persentase Rasio PAD**

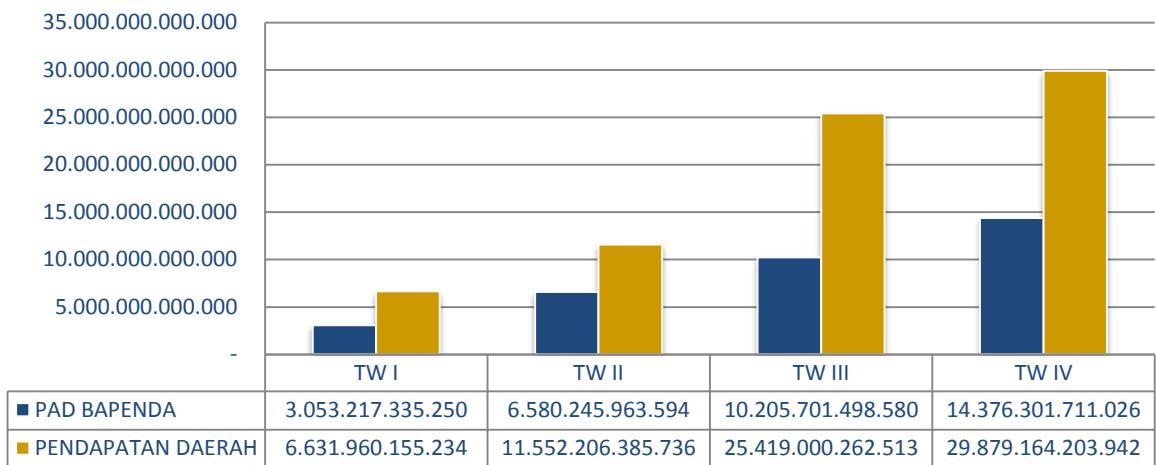
TAHUN 2016	PAD BAPENDA	PENDAPATAN DAERAH	TARGET RASIO (%)	REALISASI RASIO (%)
TW I	3.053.217.335,250	6.631.960.155.234,27	50%	46,04%
TW II	6.580.245.963,594	11.552.206.385.736,20	50%	56,96%
TW III	10.205.701.498,580	25.419.000.262.513,00	50%	45,68%
TW IV	14.376.301.711.026,40	29.879.164.203.941,90	50%	48,11%

Dengan rumus :

$$\frac{\sum \text{Penerimaan PAD}}{\sum \text{Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ \frac{14.376.301.711.026,40}{29.879.164.203.941,90} \times 100\% = 48,11\%$$

TARGET IKU 2	REALISASI	CAPAIAN
50%	48,11%	96,22%

**Grafik 3.1**  
**Rasio PAD Bapenda Prov. Jatim terhadap**  
**APBD Pemprov Jatim Tahun 2017**



### **3. Persentase Penurunan Piutang PKB**

Data piutang (tunggakan) yang digunakan sebagai tahun dasar perencanaan adalah data piutang (tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016 kebawah (2012 s/d 2016) sebesar Rp 912.110.840.443,008 (data piutang *unaudited*). Sampai dengan triwulan IV jumlah piutang yang sudah dicairkan adalah sebesar 31,78% atau Rp 289.831.527.812,00, sehingga sisa piutang PKB pada akhir triwulan IV 2017 adalah sebesar Rp 622.279.312.631,00. Berikut Kami sajikan Tabel Persentase Penurunan Piutang Pajak :

**Tabel 3.6**  
**Persentase Penurunan Piutang Pajak**

Piutang (tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016 kebawah (2012 s/d 2016)	PENCAIRAN (Rp)	SISA (Rp)	%
912.110.840.443			
TW I	66.972.219.300	845.138.621.143	7,34%
TW II	40.465.056.229	804.673.564.914	4,44%
TW III	61.693.705.500	742.979.859.414	6,76%
TW IV	120.700.546.783	622.279.312.631	13,23%
JUMLAH =			31,78%

Berikut rumus IKU 3 :

$$\frac{P_{n-1} - P_n}{P_{n-1}} \times 100\%$$

$P_n$  : piutang tahun berjalan

$P_{n-1}$  : piutang tahun sebelumnya

$$\frac{912.110.840.443 - 622.279.312.631}{912.110.840.443} \times 100\% = 31,78\%$$

TARGET IKU 3	REALISASI	CAPAIAN
10%	31,78%	317,80%

Kinerja pencairan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didukung oleh pelaksanaan operasi bersama dengan pihak POLRI, Bapenda dan Jasa Raharja, serta kegiatan dinas luar oleh penyampaian surat-surat perpajakan oleh petugas pajak pada masing-masing UPT melalui kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dukungan kebijakan maupun fungsi manajemen piutang Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh kantor Badan dengan menetapkan hasil Rapat Piutang Pajak Daerah melalui Kegiatan Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah.

Terhadap Tunggakan atau Piutang Pajak yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna melakukan kebijakan-kebijakan efisiensi dan keadilan.

Pelaksanaan kebijakan efisiensi yang dilaksanakan antara lain :

1. Memberikan kemudahan persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk pengesahan STNK tanpa melampirkan BPKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
2. Mendekatkan Layanan kepada Wajib Pajak melalui pengembangan Samsat Keliling, Samsat Payment Point, Samsat Kepulauan, e-Samsat, ATM Samsat dengan mengembangkan penggunaan layanan berbasis Teknologi Informasi serta bekerjasama dengan PT. POS Indonesia.

Pelaksanaan nilai keadilan yang dilaksanakan antara lain:

1. Memberitahukan kepada Wajib Pajak terkait kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan

- Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor 14 hari sebelum masa pajaknya berakhir dalam bentuk surat dan / atau media elektronik;
2. Melakukan Pengenaan Pajak Progresif terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis penumpang milik pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya dan roda 2 (dua) dengan isi silinder lebih dari 250 cc;
  3. Menerapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 50% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan roda 2 (dua) yang usianya di atas 25 (dua puluh lima) tahun;
  4. Memberikan Pengurangan Pajak terhadap Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Orang sebesar 40% dan Kendaraan Angkutan Barang Umum sebesar 20% yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur untuk waktu yang telah ditentukan;
  5. Memberikan Insentif Pajak berupa keringanan, pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **4. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengukuran kepatuhan Wajib Pajak adalah untuk mengukur seberapa besar rasio Wajib Pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor dalam satu tahun. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, antara lain :

- a. ***Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak*** : Wajib Pajak dikatakan sadar untuk membayar pajak ketika Wajib Pajak memiliki persepsi yang positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, memiliki karakteristik yang patuh dalam membayar pajak;
- b. ***Sikap Wajib Pajak atas sanksi denda*** dapat memperkuat dan memperlemah pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak;
- c. ***Pengaruh tingkat ekonomi Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak*** : kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut pastinya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila Wajib Pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya, yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya

Dari faktor – faktor diatas upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dilakukan dengan : kegiatan sosialisasi kepada para Wajib Pajak dalam rangka menumbuhkan sadar pajak,

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang berkualitas melalui pengembangan model pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi yang akan membuat pelayanan menjadi lebih mudah, cepat dan dekat kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan sadar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Selain peningkatan kualitas pelayanan, upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan memberikan keringanan/insentif pajak kepada masyarakat Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017, untuk meringankan beban masyarakat pada kondisi perekonomian yang sedang melambat.

Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang telah melakukan pengesahan ulang sampai tahun 2017 terealisasi sebesar .88,37% dari target yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 86%. Sehingga capaian kinerja (performance gap) masuk dalam kategori **sangat baik**. Berikut Kami sajikan Tabel Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017 :

**Tabel 3.7**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017**

TAHUN 2017	OBJEK WAJIB	TELAH PENUL		
		OBJEK	REALISASI	AGREGAT REALISASI (%)
TW I	12.743.375	2.764.790	21,70%	21,70%
TW II	13.167.257	5.624.881	42,72%	21,02%
TW III	13.617.798	9.054.044	66,49%	23,77%
TW IV	13.655.074	12.067.315	88,37%	21,89%
JUMLAH				<b>87,37%</b>
TARGET IKU 4		REALISASI	CAPAIAN	
<b>86,00%</b>		<b>88,37%</b>	<b>102,76%</b>	

Rumus :

$$\frac{\sum \text{kendaraan penul (tahun } n)}{\sum \text{kendaraan wajib penul (tahun } n)} \times 100\%$$

$$\frac{12.067.315}{13.655.074} \times 100\% = 87,37\%$$

## **5. Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**

Dalam konteks pelayanan publik yang bergerak menuju yang lebih baik, telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari paradigma tradisional ke paradigma demokrasi, yang dikenal dengan 3 model yakni model administrasi publik tradisional (*Old Public Administration, OPA*) yang kemudian bergeser ke model manajemen publik baru (*New Public Management, NPM*), dan akhirnya menjadi model pelayanan publik baru (*New Public Service, NPS*). Ketiga paradigma tersebut menunjukkan perkembangan makna pada perspektif bahwa pelayanan publik hadir untuk kepentingan siapa, dan bagaimana paradigma ini memosisikan masyarakat. Selaras dengan azas demokrasi yang menjawab pelayanan publik, maka paradigma yang dianggap ideal adalah *New Public Service (NPS)*, yaitu pelayanan publik yang responsif terhadap berbagai kepentingan public, yang selaras dengan konsep pelayanan publik demokratis.

Kualitas pelayanan publik dapat diukur dari aspek proses dan *output* pelayanan. Karena tujuan utama pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan penggunanya, maka penyedia layanan (KB. Samsat) harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna layanannya untuk memastikan pelayanannya tepat guna dan tepat sasaran.

Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur berusaha mewujudkan kualitas pelayanan publik (public service) secara terpadu, terprogram, terarah dan konsisten sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat, tepat, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN No. 16 tahun 2014).

Dari peraturan tersebut, ada 9 (Sembilan) unsur yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat dari pelayanan yang diberikan oleh pegawai/petugas pelayanan, yaitu :

- a. Persyaratan
- b. Prosedur
- c. Waktu pelayanan
- d. Biaya/Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Maklumat Pelayanan
- i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Adapun rekapitulasi Survei Kepuasan Masyarakat pada layanan KB. Samsat pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Rekapitulasi & Capaian Kinerja IKU 5 : Rata-rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2017**

No.	KB. SAMSAT	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	REKAPITULASI
1	SURABAYA TIMUR	82,10	82,21	82,51	82,59	82,35
2	SURABAYA SELATAN	81,94	81,97	82,06	86,08	83,01
3	SURABAYA BARAT	80,09	80,14	80,34	86,14	81,68
4	SURABAYA UTARA	88,15	88,67	88,69	88,71	88,55
5	MOJOKERTO	80,48	80,75	80,75	80,75	80,68
6	SIDOARJO KRIAN	81,01	80,03	81,25	81,47	80,94
7	SIDOARJO KOTA	81,27	81,29	80,05	80,31	80,73
8	GRESIK	80,38	80,04	86,21	86,25	83,22
9	JOMBANG	80,73	80,97	87,34	87,32	84,09
10	BOJONEGORO	88,82	88,89	88,95	89,01	88,92
11	TUBAN	88,17	88,32	88,39	88,45	88,33
12	LAMONGAN	94,02	94,04	94,05	94,09	94,05
13	NGAWI KOTA	77,59	81,20	82,23	82,75	80,94
14	NGAWI WIDODAREN	77,33	80,94	82,48	82,70	80,86
15	MADIUN KABUPATEN	85,41	85,43	85,49	85,41	85,44
16	MADIUN KOTA	85,34	85,77	85,84	86,10	85,76
17	MAGETAN	91,24	91,26	91,54	91,67	91,43
18	PONOROGO	90,89	90,93	92,02	91,13	91,24
19	PACITAN	86,26	86,30	86,34	86,36	86,31
20	KEDIRI KAB. KATANG	80,24	80,27	80,29	86,08	81,72
21	KEDIRI KAB. PARE	80,68	80,81	80,83	85,99	82,08
22	KEDIRI KOTA	80,57	80,68	80,70	86,27	82,05
23	NGANJUK	82,33	82,50	82,83	82,92	82,65
24	TULUNGAGUNG	89,87	89,17	89,32	89,50	89,47
25	TRENGGALEK	89,06	89,08	89,09	89,10	89,08
26	MALANG KOTA	88,25	88,26	88,28	88,30	88,27
27	MALANG SELATAN	92,13	92,31	92,50	92,61	92,39
28	MALANG UTR KR. PLOSO	95,68	88,12	89,00	89,56	90,59
29	MALANG UTR BATU	90,08	90,26	91,02	91,10	90,62
30	BLITAR KOTA	85,69	85,78	85,86	85,91	85,81

No.	KB. SAMSAT	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	REKAPITULASI
31	BLITAR KABUPATEN	85,71	85,80	85,91	85,99	85,85
32	PROBOLINGGO KOTA	85,32	85,41	85,49	85,53	85,44
33	PROBOLINGGO KRAKSAAN	85,25	85,44	85,46	85,47	85,40
34	LUMAJANG	89,23	89,26	89,26	89,28	89,26
35	PASURUAN KOTA	88,02	88,02	88,19	88,13	88,09
36	PASURUAN KAB/BANGIL	88,21	88,25	88,27	88,41	88,28
37	SITUBONDO	88,08	88,10	88,11	88,13	88,11
38	JEMBER BARAT (SOEBANDI)	91,16	91,10	91,24	91,27	91,19
39	JEMBER TIMUR (TERATAI)	94,88	94,88	94,91	94,88	94,88
40	BONDOWOSO	90,63	90,66	90,69	90,71	90,67
41	BANYUWANGI	89,02	89,04	89,15	89,17	89,09
42	BANYUWANGI BENCULUK	90,89	91,11	91,15	91,18	91,08
43	PAMEKASAN	93,74	89,49	89,33	89,66	90,55
44	SAMPANG	90,04	91,04	91,08	91,12	90,82
45	BANGKALAN	80,14	86,00	86,08	86,08	84,58
46	SUMENEP	88,19	87,52	88,23	88,24	88,04
<b>NILAI TOTAL SKM</b>		<b>3.974,32</b>	<b>3.977,51</b>	<b>3.998,80</b>	<b>4.027,87</b>	<b>3.994,62</b>
<b>NILAI RATA-RATA SKM PER TRIWULAN</b>		<b>86,40</b>	<b>86,47</b>	<b>86,93</b>	<b>87,56</b>	<b>86,84</b>
<b>NILAI RATA-RATA SKM TAHUN 2017</b>						

TARGET IKU 5	REALISASI	CAPAIAN
86,00	86,84	100,98%

Dengan rumus :

$$\frac{N \text{ SKM}_{1-46}}{\sum \text{ KB SAMSAT}}$$

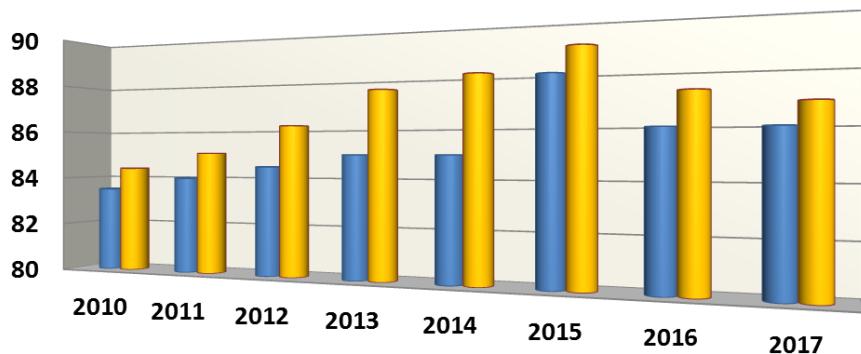
$N \text{ SKM}_{1-46}$  : nilai total SKM pada 46 KB. SAMSAT

$$\frac{3.994,62}{46 \text{ KB. Samsat}} = 86,84$$

Selama bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember 2017 diperoleh nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada 46 Kantor Bersama Samsat sebesar 86,48, sehingga capaian kinerja terealisasi 100,98 %.

Berikut grafik capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2017 :

**Grafik 3.2**  
**Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2010-2017 untuk Indikator Kinerja Utama :  
Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**



Berikut Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai rata-rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan memanfaatkan teknologi informasi (hardware dan software) sebagai pendukung utama kelembagaan;
- b. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang etika pelayanan;
- c. Melakukan survei secara berkala kepada 46 KB Samsat untuk mendapatkan *feedback* dari Wajib Pajak terhadap layanan yang telah diterima serta setiap pengaduan akan mendapatkan tindak lanjut berupa tindakan perbaikan sebagaimana mestinya guna Peningkatan Kinerja Pelayanan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap 9 (Sembilan) unsur SKM yang masih rendah dan mencari solusi pemecahan secara tepat, sehingga unsur SKM yang masih rendah dapat lebih ditingkatkan serta melakukan monitoring dan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tindakan perbaikan dimaksud.

## **6. Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan**

Untuk lebih meningkatkan tingkat penerimaan/penggunaan diversifikasi layanan berupa layanan unggulan, maka perlu dilakukan pengembangan dan evaluasi secara berkelanjutan atas semua jenis layanan unggulan baik yang berbasis teknologi informasi maupun yang diselenggarakan bersama dengan para mitra. Pada tahun 2017, fokus kegiatan yang dilaksanakan adalah memperbanyak jumlah mesin embosser elektronik yang digunakan pada kantor pos, kemudian pengembangan sarana/prasarana pembayaran pajak daerah secara non tunai, serta kegiatan upgrading/pemeliharaan perangkat keras maupun perangkat lunak teknologi informasi pendukung layanan unggulan untuk menghindari *downtime* maupun hambatan jaringan lainnya yang menghambat waktu pelayanan. Kegiatan upgrading maupun pemeliharaan tersebut diakomodasi melalui kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administrasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah dan kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah. Berikut Kami sajikan data capaian pada IKU 6 (Percentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan) di tahun 2017 :

**Tabel 3.9  
Data Pengguna Layanan Samsat Unggulan IKU 6 Tahun 2017**

TAHUN 2017	TELAH PENUL	REALISASI PENGGUNA LAYANAN SAMSAT UNGGULAN	%
TRIWULAN 1	2.764.790	1.247.193	45,11%
TRIWULAN 2	5.624.881	3.239.739	57,60%
TRIWULAN 3	9.054.044	5.065.775	55,95%
TRIWULAN 4	12.067.315	6.203.807	51,41%

TARGET IKU 6	REALISASI	CAPAIAN
45%	51,41%	114,24%

Dengan rumus :

$$\frac{\text{Wajib Pajak pengguna layanan unggulan}}{\text{Wajib Pajak pengguna layanan keseluruhan}} \times 100\%$$

$$\frac{6.203.807}{12.067.315} \times 100\% = 51,41\%$$

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan. Berikut tabel komposisi belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017

**Tabel 3.10 Komposisi Belanja Bapenda Prov. Jatim TA. 2017**

JENIS BELANJA	TAHUN 2017		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Tidak Langsung	346.251.891.000,00	294.990.191.237,00	85,20
Belanja Langsung	203.381.407.830,00	183.319.119.582,00	90,14
Jumlah	549.633.298.830,00	478.309.310.819,00	87,02

Dimana penjabaran teknis mengenai program, sasaran dari belanja langsung sebagaimana yang tercantum dalam DPPA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.11  
Realisasi Belanja Langsung Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017**

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70.464.208.175,00	62.773.031.078,00	89,08	(7.691.177.097,00)
1	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	70.464.208.175,00	62.773.031.078,00	89,08	(7.691.177.097,00)
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	77.643.814.028,00	70.451.531.083,00	90,74	(7.192.282.945,00)
1	<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	37.735.838.648,00	33.591.114.212,00	89,02	(4.144.724.436,00)
2	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	39.907.975.380,00	36.860.416.871,00	92,36	(3.047.558.509,00)
C	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	17.547.219.000,00	14.282.115.813,00	81,39	(3.265.103.187,00)

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	6.769.674.000,00	5.798.209.270,00	85,65	(971.464.730,00)
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.777.545.000,00	8.483.906.543,00	78,72	(2.293.638.457,00)
D	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	1.712.617.000,00	1.547.978.097,00	90,39	(164.638.903,00)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	704.772.000,00	628.000.282,00	89,11	(76.771.718,00)
2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	719.515.000,00	637.497.815,00	88,60	(82.017.185,00)
3	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	288.330.000,00	282.480.000,00	97,97	(5.850.000,00)
E	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	36.013.549.627,00	34.264.463.511,00	95,14	(1.749.086.116,00)
1	Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah	575.974.000,00	544.776.849,00	94,58	(31.197.151,00)
2	Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	4.009.130.000,00	3.869.215.353,00	96,51	(139.914.647,00)
3	Pengelolaan dan Monitoring bagi Hasil Pajak	553.480.000,00	522.679.220,00	94,44	(30.800.780,00)
4	Pengembangan Kerjasama Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal	52.820.000,00	47.943.750,00	90,77	(4.876.250,00)
5	Pelaksanaan Sertifikasi dan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Pajak Daerah	3.104.010.500,00	3.026.237.686,00	97,49	(77.772.814,00)
6	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan KB. Samsat	14.850.000,00	14.410.000,00	97,04	(440.000,00)
7	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat	139.320.000,00	133.203.200,00	95,61	(6.116.800,00)
8	Pengembangan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah	1.202.500.000,00	1.114.368.000,00	92,67	(88.132.000,00)
9	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas	1.866.709.890,00	1.535.931.237,00	82,28	(330.778.653,00)
10	Pengelolaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya	127.986.000,00	107.291.865,00	83,83	(20.694.135,00)
11	Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	863.600.000,00	716.050.578,00	82,91	(147.549.422,00)
12	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi	195.960.000,00	145.247.200,00	74,12	(50.712.800,00)

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
13	<i>Pengembangan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administrasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah</i>	1.603.970.000,00	1.544.003.144,00	96,26	(59.966.856,00)
14	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur</i>	603.747.000,00	537.343.326,00	89,00	(66.403.674,00)
15	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara</i>	676.536.000,00	638.429.424,00	94,37	(38.106.576,00)
16	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan</i>	631.938.000,00	618.774.262,00	97,92	(13.163.738,00)
17	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat</i>	593.173.000,00	563.997.896,00	95,08	(29.175.104,00)
18	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sidoarjo</i>	855.875.000,00	810.330.420,00	94,68	(45.544.580,00)
19	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Mojokerto</i>	684.096.100,00	665.705.997,00	97,31	(18.390.103,00)
20	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Gresik</i>	671.080.000,00	652.268.947,00	97,20	(18.811.053,00)
21	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jombang</i>	603.024.000,00	582.156.587,00	96,54	(20.867.413,00)
22	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bojonegoro</i>	618.918.300,00	582.126.734,00	94,06	(36.791.566,00)
23	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tuban</i>	671.278.400,00	630.248.265,00	93,89	(41.030.135,00)
24	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Lamongan</i>	638.011.700,00	620.650.885,00	97,28	(17.360.815,00)

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
25	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Ngawi	664.432.500,00	655.917.540,00	98,72	(8.514.960,00)
26	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Madiun	722.530.000,00	701.525.442,00	97,09	(21.004.558,00)
27	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Magetan	524.092.000,00	509.148.483,00	97,15	(14.943.517,00)
28	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Ponorogo	548.097.000,00	540.735.329,00	98,66	(7.361.671,00)
29	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pacitan	525.715.000,00	514.021.466,00	97,78	(11.693.534,00)
30	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kediri	993.905.000,00	971.292.750,00	97,72	(22.612.250,00)
31	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tulungagung	470.089.000,00	431.668.324,00	91,83	(38.420.676,00)
32	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Trenggalek	565.950.347,00	532.853.339,00	94,15	(33.097.008,00)
33	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nganjuk	524.101.000,00	505.735.362,00	96,50	(18.365.638,00)
34	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Kota	571.547.000,00	553.094.198,00	96,77	(18.452.802,00)
35	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Selatan	732.936.540,00	727.857.502,00	99,31	(5.079.038,00)
36	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota	602.021.000,00	593.369.348,00	98,56	(8.651.652,00)
37	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Blitar	563.926.250,00	545.635.436,00	96,76	(18.290.814,00)

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
38	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Probolinggo	650.696.000,00	635.469.140,00	97,66	(15.226.860,00)
39	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Lumajang	595.198.000,00	573.694.399,00	96,39	(21.503.601,00)
40	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pasuruan	801.520.000,00	767.879.100,00	95,80	(33.640.900,00)
41	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Situbondo	542.982.000,00	524.173.371,00	96,54	(18.808.629,00)
42	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember	640.029.500,00	618.932.459,00	96,70	(21.097.041,00)
43	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso	447.921.500,00	436.815.885,00	97,52	(11.105.615,00)
44	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Banyuwangi	806.969.100,00	783.245.334,00	97,06	(23.723.766,00)
45	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pamekasan	437.397.000,00	427.067.078,00	97,64	(10.329.922,00)
46	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bangkalan	514.201.000,00	495.521.876,00	96,37	(18.679.124,00)
47	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sampang	463.270.000,00	456.400.200,00	98,52	(6.869.800,00)
48	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep	546.035.000,00	539.019.325,00	98,72	(7.015.675,00)
JUMLAH		203.381.407.830,00	183.319.119.582,00	90,14	(20.062.288.248,00)

Untuk program prioritas/utama Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat terealisasi sebesar Rp 34.264.463.511,- (tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah) atau persentase

realisasi penyerapan anggarannya sebesar 95,14%. Dan dari persentase realisasi penyerapan anggaran pada ke-5 (lima) Program secara keseluruhan yaitu sebesar 90,14%.

### **Cost per Outcome**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome).

Tujuan dari pada Cost per Outcome adalah menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja (kegiatan) yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi, transparansi dalam penganggaran dan meningkatkan fleksibilitas serta akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.

Dalam penganggaran berbasis kinerja dilakukan berdasarkan, Indikator Kinerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja dari setiap Program dan jenis kegiatan sehingga akan menghasilkan Capaian Kinerja. Berikut Tabel alokasi Per Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur :

**Tabel 3.12**  
**Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	203.381.407.830	90,14
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah		
	Persentase Penurunan Piatung Pajak Kendaraan Bermotor		
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak		
	Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat		
	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Ungulan		

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcomes) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian serapan anggaran sebesar 90,20% dari total anggaran Program sebesar Rp 197.169.336.861,- (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu

rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi peningkatan capaian kinerja terhadap capaian penyerapan realisasi anggaran. Sehingga diharapkan kedepan dapat lebih diselaraskan dan ditingkatkan.

### *Pencapaian Kinerja dan Anggaran*

Penganggaran berbasis kinerja, merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

Berikut Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi jawa Timur :

**Tabel 3.13  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Sasaran Strategis	IKU	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	8,76%	12,34%	140,87%	203.381.407.830	183.319.119.582	90,14
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	50,00 %	48,11%	96,22%			
	Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	10,00 %	31,78%	317,80%			
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	86,00 %	88,37%	102,76%			
	Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat	86,00	86,84	100,98%			
	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	45%	51,41%	114,24%			

secara umum, jumlah prosentase program prioritas/utama **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** sebesar Rp 41.276.251.300,- dengan realisasi penyerapannya sebesar Rp 38.651.403.661,84,- atau prosentase realisasi penyerapan anggarannya sebesar 93,64%.

## I. Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dan berkembang apabila dalam organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda, antara lain :

- Organisasi makin mampu meningkatkan produktivitas; dan
- Semakin terlihat adanya kinerja organisasi yang makin efisien.

Demikian halnya dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan suatu organisasi perangkat daerah, tentu saja diharapkan dapat tumbuh dan berkembang, utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dan Untuk mencapai sasaran organisasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta terus-menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia dalam bentuk perencanaan program kegiatan yang baik.

**Tabel 3.14**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber daya**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2017	CAPAIAN (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	12,34%	140,87%	90,14	55,34
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	48,11%	96,22%		
	Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	31,78%	317,80%		
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	88,37%	102,76%		
	Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat	86,84	100,98%		
	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	51,41%	114,24%		
<b>TOTAL CAPAIAN</b>			<b>145,48%</b>		

Pencapaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2016 mencapai sebesar 145,48%. Sehingga bila prosentase penyerapan anggaran sebesar 90,14% di bagi dengan capaian kinerja maka mencapai tingkat efisiensi sebesar 55,34%.

## II. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir Periode Renstra

Tingkat keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas utama dapat dilihat pada tabel berikut :

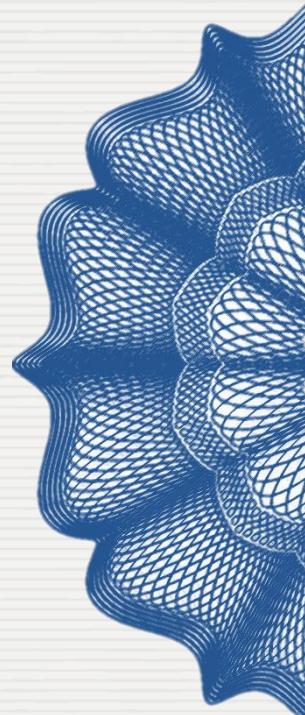
**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR Renstra (Th. 2019)	REALISASI (Th. 2017)	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	1,86%	12,34%	663,44%
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	48,11%	-
	Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	-	31,78%	-
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	86%	88,37%	102,76%
	Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat	86	86,84	100,98%
	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	52%	51,41%	98,87%

Untuk target akhir renstra tahun 2019, IKU Rasio PAD terhadap Pendapatan daerah dihilangkan karena merupakan ranah BPKAD dan IKU Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dihilangkan karena Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) terhadap pengakuan piutang. Sehingga untuk IKU pada tahun mendatang yaitu tahun 2018 menjadi 4 (empat) IKU.

# **BAB 4**

## **KESIMPULAN**



## A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan atau kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017, pencapaian skor kinerja dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada periode tersebut secara keseluruhan adalah 145,48 %, meningkat dari skor capaian kinerja periode sebelumnya yakni Tahun 2016 yang dicapai sebesar 145,15%.

Capaian tersebut didukung dengan pemanfaatan anggaran sebesar Rp 183.319.119.582,00 atau sebesar 90,14% dari anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp 203.381.407.830,00.



## B. LANGKAH SELANJUTNYA



Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Seiring dengan sistem komputerisasi yang menjadi tulang punggung dalam sarana dan prasarana, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur akan senantiasa meningkatkan kapabilitas (kemampuan) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, khususnya dalam hal kualitas pelayanan publik.
2. Melaksanakan perbaikan sistem jaringan guna mendukung pengembangan Teknologi Informasi dalam pengelolaan keuangan dan perbaikan kualitas pelayanan serta pengembangan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pihak lain;
3. Melaksanakan inovasi-inovasi, baik dalam hal penagihan Pajak Daerah maupun pelayanan kepada Wajib Pajak dengan melihat karakteristik dan kultur masyarakat Wajib Pajak, serta memperhatikan keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada;

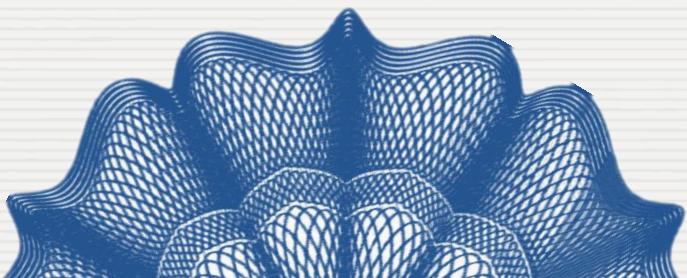
4. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas serta kerjasama (*Networking*) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Pengembangan Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
6. Pengembangan pelayanan yang lebih mendekati masyarakat dengan pendirian Samsat Payment Point yang bekerjasama dengan pihak lain di seluruh pelosok Jawa Timur, dengan upaya tersebut diharapkan dapat memberi pesan positif terhadap kesadaran masyarakat Jawa Timur untuk melaksanakan kewajiban membayar Pajak Daerah.

Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur secara memadai kepada publik, baik dalam aspek format penyajian maupun maupun aspek akuntabilitasnya.



# **LAMPIRAN**

---





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

### BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. SOEKARWO

Jabatan : GUBERNUR JAWA TIMUR

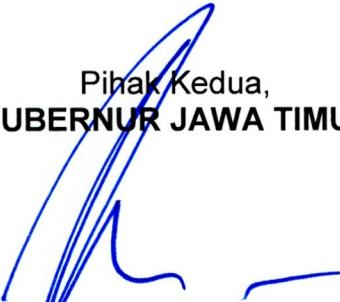
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

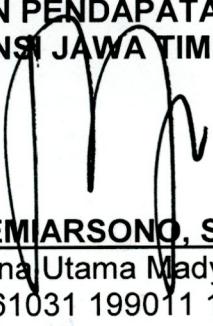
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 2 Oktober 2017

Pihak Kedua,  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**

  
Dr. H. SOEKARWO

Pihak Pertama,  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**

  
**BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661031 199011 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	8,76%
		Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	50,00%
		Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	10%
		Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	86,00%
		Rata-Rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	86,00
		Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	45%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 70.464.208.175,00	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 77.643.814.028,00	APBD
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp 17.547.219.000,00	APBD
4	Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 1.712.617.000,00	APBD
5	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 36.013.549.627,00	APBD
Jumlah		Rp <b>203.381.407.830,00</b>	

Surabaya, 2 Oktober 2017

Pihak Kedua,  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**

Dr. H. SOEKARWO

Pihak Pertama,  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19661031 199011 1 001

**PENGUKURAN KINERJA**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	CAPAIAN
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	8,76%	12,34%	140,87%
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	50,00%	48,11%	96,22%
	Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	10%	31,78%	317,80%
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	86,00%	88,37%	102,76%
	Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat	86,00	86,84	100,98%
	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	45%	51,41%	114,24%
<b>RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN KINERJA</b>				<b>145,48%</b>

Surabaya, 12 Pebruari 2018  
 Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Provinsi Jawa Timur  
  
BOBBY SOEMARSONO, SH, M.Si  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19661031 199011 1 001

**Penghargaan “SAKIP”**  
**Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017**



**Penghargaan terbaik ke-empat Kompetisi Budaya Kinerja  
Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk KBK. SALES (UPTB Nganjuk)**



**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja Program/Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2015-2019**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPIAAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE KENASTRI PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Tingkat Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						Rp 11.539.074.054.594,60	4,72%		5,80%		1,00%		2,01%		1,86%		1,86%	
	2. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah							61,70%	50%		50%		50%		-	-	-	-	50%	
	3. Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)							Rp 857.192.838.040,00	35%		30%		20%		-	-	-	-	20%	
	1.20.17	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
		1. Tingkat Persentase Kenalihan Penerimaan Pendapatan Adil Daerah						9.464.416.237.214	32,71%	68.948.173.492	46,09%	41.266.651.456	60,53%	34.660.004.010					60,53%	144.874.828.958
		2. Tingkat Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor						1.127.286.400.141	40%		45%		50%						50,00%	
		3. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						87,56	87,50		88,00		86,00						86,00	
		4. Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008						4	1		1		1						3	
		5. Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Sumsat Unggulan						4.631.966	25%		30%		45%						45%	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPOA PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
									2015		2016		2017		2018		2019					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1.20.17.019	a.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	- Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	4 kegiatan	306.212.588	4 kegiatan	142.540.000						6 kegiatan	448.752.588		
				3.07.17.019	a.	Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah	- Jumlah Kegiatan Lelang Kayu Hasil Hutan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0				70 keg lelang	458.585.000					70 keg lelang	458.585.000		
				1.20.17.210	b.	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	- Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan	Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10 Kegiatan	9 Kegiatan	4.534.421.326	31 Kegiatan	4.129.855.000						40 kegiatan	8.664.276.326		
				3.07.17.210	b.	Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	- Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan	Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					31 Kegiatan	3.406.055.000					31 kegiatan	3.406.055.000		
				1.20.17.212	c.	Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait	jumlah kegiatan koordinasi / evaluasi terkait penerimaan DBH dan Pendapatan Daerah Lainnya	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22 Kab/ kota	22 Kab/ kota	1.002.645.485	22 Kab/ kota	791.590.000						22 kab/kota	1.794.235.485		
				3.07.17.212	c.	Pengelolaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak	jumlah kegiatan koordinasi / evaluasi terkait penerimaan DBH dan Pendapatan Daerah Lainnya	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					38 Kab/Kota	540.980.000					38 Kab/Kota	540.980.000		
				1.20.17.213	d.	Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Relawan Publik (Benchmarking)	Jumlah kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 bank	1 bank	52.490.663	1 bank	52.820.000						2 bank	105.310.663		
				3.07.17.213	d.	Pengembangan Kerjasama Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal	Jumlah kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					2 kegiatan	52.820.000					2 kegiatan	52.820.000		



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPOA PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
									2015		2016		2017		2018		2019					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
									12.0.17.249	k. Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah	Jumlah kerjas kerja koordinasi dan intensifikasi	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Dokumen	337.630.612	2 Dokumen	184.796.000				24 dokumen	522.426.612	
									3.07.17.249	k. Pengelolaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya	Jumlah kegiatan koordinasi dan monitoring peningkatan penerimaan pendapatan daerah lainnya	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				2 kegiatan	282.815.000		2 kegiatan	282.815.000		
									1.20.17.257	I. Pengelolaan Data Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	14 dokumen	5 dokumen	551.252.648	5 dokumen	473.440.000				10 dokumen	1.024.692.648
									3.07.17.257	I. Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah				5 dokumen	852.400.000		5 dokumen	852.400.000		
									1.20.17.258	m. Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD	Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang kompeten	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	162 orang	105 orang	157.855.450	105 orang	137.840.000				210 orang	295.695.450
									3.07.17.258	m. Pengembangan Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi	Jumlah sumber daya aparatur Bapenda yang kompeten	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				105 orang	195.960.000		105 orang	195.960.000		
									1.20.17.259	n. Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD	Jumlah sarana pendukung pelayanan	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	92 server	12 unit	5.640.642.175	12 unit	2.282.100.000				46 server	7.922.742.175
									3.07.17.259	n. Pengembangan Sarana dan Prasarana Jaringan Komputer dan Sistem Aplikasi Administrasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Jumlah sarana pendukung pelayanan	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan				27 titik jaringan	1.889.570.000		27 titik jaringan	1.889.570.000		
									1.20.17.265	o. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Timur	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp 1.622 miliar	1.379.872.165	Rp 2.420 miliar	710.607.200				Rp 4.042 miliar	2.090.479.365

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPIAAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
									2015		2016		2017		2018		2019					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				3.07.17.265	o. Penyelenggaran Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Timur	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)							Rp 2.950 miliar	619.547.000				Rp 2.950 miliar	619.547.000		
				120.17.266	p. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Bisnis Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp 405 miliar	1.171.367.936	Rp 598 miliar	624.983.100							Rp 1.003 miliar	1.796.351.036		
				3.07.17.266	p. Penyelenggaran Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Utara	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)							Rp 570 miliar	704.376.000				Rp 570 miliar	704.376.000		
				120.17.267	q. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Bisnis Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp 1.938 miliar	1.030.660.464	Rp 2.531 miliar	586.452.900							Rp 4.514 miliar	1.617.113.364		
				3.07.17.267	q. Penyelenggaran Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Selatan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)							Rp 2.506 miliar	525.648.000				Rp 2.506 miliar	525.648.000		
				120.17.268	r. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Bisnis Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp 413 miliar	1.385.689.117	Rp 590 miliar	749.187.900							Rp 1.004 miliar	2.134.877.017		
				3.07.17.268	r. Penyelenggaran Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Barat	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)							Rp 569 miliar	630.361.000				Rp 569 miliar	630.361.000		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Rp.
									Rp 578 miliar	1.926.179.907	Rp 852 miliar	922.237.008							Rp 1.431 miliar	2.848.416.915
				1.20.17.269	s.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)											Rp 824 miliar	824.125.000
				3.07.17.269	s.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sidoarjo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sidoarjo	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)											Rp 511 miliar	2.369.640.265
				1.20.17.270	t.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp 212 miliar	1.498.409.365	Rp 298 miliar	871.230.900						Rp 287 miliar	675.646.100
				3.07.17.270	t.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Mojokerto	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Mojokerto	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)											Rp 619 miliar	1.815.029.141
				1.20.17.271	u.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp 253 miliar	1.156.180.241	Rp 366 miliar	658.848.900						Rp 348 miliar	586.730.000
				3.07.17.271	u.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Gresik	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Gresik	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)											Rp 348 miliar	586.730.000
				1.20.17.272	v.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp 144 miliar	1.293.901.680	Rp 218 miliar	784.544.800						Rp 363 miliar	2.078.446.480

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDIKI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
									2015		2016		2017		2018		2019					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					3.07.17.272	v. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jombang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jombang	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)							Rp 204 miliar	638.894.000			Rp 204 miliar	638.894.000		
					120.17.273	w. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegoro	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp 129 miliar	1.219.829.512	Rp 182 miliar	673.240.400							Rp 312 miliar	1.893.069.912	
					3.07.17.273	w. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bojonegoro	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bojonegoro	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)							Rp 165 miliar	664.074.800			Rp 165 miliar	664.074.800		
					120.17.274	x. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp 128 miliar	1.269.286.243	Rp 185 miliar	673.325.450							Rp 313 miliar	1.942.611.693	
					3.07.17.274	x. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tuban	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tuban	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)							Rp 177 miliar	578.394.200			Rp 177 miliar	578.394.200		
					120.17.275	y. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp 140 miliar	1.272.666.145	Rp 199 miliar	732.054.192							Rp 339 miliar	2.004.720.337	
					3.07.17.275	y. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Lamongan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lamongan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)							Rp 192 miliar	630.486.200			Rp 192 miliar	630.486.200		
					120.17.276	z. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur NTT	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp 79 miliar	1.220.152.689	Rp 120 miliar	707.880.100							Rp 200 miliar	1.928.032.789	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET		Rp.	
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					3.07.17.276	z. Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Ngawi	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ngawi	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)													Rp 111 miliar	607.932.500
					120.17.277	aa. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madura	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)													Rp 328 miliar	2.202.719.976
					3.07.17.277	aa. Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Madura	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Madura	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)													Rp 187 miliar	696.105.000
					120.17.278	ab. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)													Rp 196 miliar	1.544.063.394
					3.07.17.278	ab. Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Magetan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Magetan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)													Rp 112 miliar	513.256.000
					120.17.279	ac. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)													Rp 250 miliar	1.742.735.776
					3.07.17.279	ac. Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Ponorogo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ponorogo	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)													Rp 145 miliar	548.617.000
					120.17.280	ad. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasien	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)													88 miliar	1.756.635.461

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPIAAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET		Rp.	
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					3.07.17.280	ad. Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pacitan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pacitan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)													Rp 49 miliar	523.140.000
					120.17.281	ae. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)													Rp 674 miliar	2.847.420.565
					3.07.17.281	ae. Peningkangasian Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kediri	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Kediri	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)													Rp 388 miliar	843.129.000
					120.17.282	af. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)													Rp 425 miliar	1.606.484.540
					3.07.17.282	af. Peningkangasian Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tulungagung	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tulungagung	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)													Rp 241 miliar	505.394.000
					120.17.283	ag. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)													Rp 168 miliar	1.487.673.034
					3.07.17.283	ag. Peningkangasian Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Trenggalek	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Trenggalek	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)													Rp 90 miliar	527.622.250
					120.17.284	ah. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngepu	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)													276 miliar	1.653.563.481

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPOAIAH PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2015		2016		2017		2018		2019				
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					3.07.17.284	ah.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nganjuk	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Nganjuk	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					Rp 159 miliar	516.933.000				Rp 159 miliar	516.933.000	
					120.17.285	ai.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 295 miliar	1.462.122.875	Rp 404 miliar	804.496.700							Rp 699 miliar	2.266.619.575
					3.07.17.285	ai.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Kota	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					Rp 391 miliar	563.742.000				Rp 391 miliar	563.742.000	
					120.17.286	ai.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Selatan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 161 miliar	1.346.963.089	Rp 250 miliar	780.076.900							Rp 411 miliar	2.127.039.989
					3.07.17.286	ai.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Selatan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Selatan	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					Rp 237 miliar	728.733.540				Rp 237 miliar	728.733.540	
					120.17.287	ak.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 172 miliar	1.218.398.619	Rp 259 miliar	707.325.400							Rp 432 miliar	1.925.724.019
					3.07.17.287	ak.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Utara dan Batu Kota	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					Rp 251 miliar	588.021.000				Rp 251 miliar	588.021.000	



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET		
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									Rp 46 miliar	867.831.220	Rp 70 miliar	529.777.900							Rp 116 miliar	1.397.609.120	
				120.17.292	ap.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)													
				3.07.17.292	ap.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Situbondo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Situbondo	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)											Rp 69 miliar	543.722.000	
				120.17.293	aq.	Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp 186 miliar	1.621.616.061	Rp 275 miliar	932.054.900							Rp 462 miliar	2.553.670.961
				3.07.17.293	aq.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jember	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)											Rp 265 miliar	657.435.000	
				120.17.294	ar.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp 42 miliar	1.295.937.505	Rp 64 miliar	688.796.900							Rp 107 miliar	1.994.734.405
				3.07.17.294	ar.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bondowoso	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)											Rp 62 miliar	457.791.500	
				120.17.295	as.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp 218 miliar	1.323.625.410	Rp 304 miliar	734.163.150							Rp 523 miliar	2.057.788.560
				3.07.17.295	as.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Banyuwangi	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Banyuwangi	Percentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)											Rp 286 miliar	727.009.100	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPOA PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
									2015				2016				2017				2018		2019	
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
					120.17.296	at. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Ginas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 58 miliar	1.095.158.724	Rp 81 miliar	678.565.000								Rp 139 miliar	1.773.723.724			
					3.07.17.296	at. Penyekenggaran Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pamekasan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pamekasan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)												Rp 71 miliar	417.635.000			
					120.17.297	au. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Ginas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bangkalan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 59 miliar	902.862.643	Rp 79 miliar	496.320.400									Rp 139 miliar	1.399.183.043		
					3.07.17.297	au. Penyekenggaran Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bangkalan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bangkalan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)												Rp 73 miliar	492.491.000			
					120.17.298	av. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Ginas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sampang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 33 miliar	958.479.915	Rp 47 miliar	534.434.500									Rp 80 miliar	1.492.914.415		
					3.07.17.298	av. Penyekenggaran Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sampang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sampang	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)												Rp 42 miliar	445.008.000			
					120.17.299	aw. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Ginas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sumenep	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 52 miliar	857.911.400	Rp 72 miliar	483.210.900									Rp 125 miliar	1.341.122.300		
					3.07.17.299	aw. Penyekenggaran Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sumenep	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)												Rp 63 miliar	544.185.000			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPIAAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
									2015					2016					2017		2018		2019	
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
					<p>3.07.051 II Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah</p> <p>3.07.051.001 1 Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</p> <p>3.07.051.002 2 Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah</p> <p>3.07.051.003 3 Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah</p> <p>3.07.051.004 4 Pemenuhan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah</p> <p>3.07.052 III Program Pengelolaan Pajak Daerah</p> <p>3.07.052.001 1 Intensifikasi Penerimaan PKB &amp; BBNKB</p> <p>3.07.052.002 2 Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya</p> <p>3.07.053 IV Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan</p> <p>3.07.053.001 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah</p>	<p>Target Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Analisa Potensi PAD</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan Distribusi Target PAD</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rekonsiliasi</p> <p>Jumlah Software Pendukung Layanan</p> <p>Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Miliar Rupiah)</p> <p>Jumlah laporan hasil kegiatan intensifikasi penerimaan PKB &amp; BBNKB</p> <p>Jumlah laporan hasil kegiatan intensifikasi penerimaan Pajak Daerah lainnya</p> <p>Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah &amp; Lain-Lain Pendapatan (Miliar Rupiah)</p> <p>1 Jumlah Laporan Monitoring Lelang Kayu Hasil Hutan</p> <p>2 Jumlah Dokumen Hasil Penggalian Potensi Objek Retribusi Daerah</p>																		
									-	-	-	-	-	-	-	12.425,0	3.774.737.686	12.656,0	4.144.543.761	25.081,0	7.919.281.447			
									-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	75.000.000	2 dokumen	75.000.000	4 dokumen	150.000.000			
									-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	75.000.000	2 dokumen	75.000.000	4 dokumen	150.000.000			
									-	-	-	-	-	-	-	12 dokumen	852.400.000	12 dokumen	900.000.000	24 dokumen	1.752.400.000			
									-	-	-	-	-	-	-	2 paket	2.772.337.686	2 paket	3.094.543.761	4 paket	5.866.881.447			
									-	-	-	-	-	-	-	12.403,0	7.082.213.744	12.633,0	7.776.048.888	25.036,0	14.858.262.632			
									-	-	-	-	-	-	-	8 dokumen	4.249.328.246	8 dokumen	4.665.629.333	16 dokumen	8.914.957.579			
									-	-	-	-	-	-	-	7 dokumen	2.832.885.498	7 dokumen	3.110.419.555	14 dokumen	5.943.305.053			
									-	-	-	-	-	-	-	22,7	3.005.742.870	23,9	3.639.939.194	46,6	6.645.682.064			
									-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	1.052.779.304	2 dokumen	1.274.910.337	4 dokumen	2.327.689.641			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD				
									2015		2016		2017		2018		2019				
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									-	-	-	-	-	-	2 dokumen	1.142.181.330	2 dokumen	1.383.175.731	4 dokumen	2.525.357.061	
					2	Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Bagi Hasil Pajak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Teknis Regulasi Penghitungan PPH O/PN dan Pasal 21		-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	270.000.080	1 dokumen	326.968.709	2 dokumen	596.968.789
					4	Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya	Jumlah laporan kegiatan Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	4 dokumen	540.782.156	4 dokumen	654.884.417	8 dokumen	1.195.666.573
			V		Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah		1 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Timur (Miliar Rupiah)		-	-	-	-	-	-	-	2.497,8	55.517.525.736	2.554	60.956.504.546	5.052,1	116.474.030.282
							2 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Selatan (Miliar Rupiah)		-	-	-	-	-	-	-	2.501,9		2.548		5.050,3	
							3 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Barat (Miliar Rupiah)		-	-	-	-	-	-	-	566,5		577		1.143,6	
							4 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Utara (Miliar Rupiah)		-	-	-	-	-	-	-	576,6		587,3		1.163,9	
							5 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Mojokerto (Miliar Rupiah)		-	-	-	-	-	-	-	281,5		286,7		568,2	
							6 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sidorojo (Miliar Rupiah)		-	-	-	-	-	-	-	811,8		826,9		1.638,7	
							7 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Gresik (Miliar Rupiah)		-	-	-	-	-	-	-	351,7		358,2		709,9	
							8 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jombang (Miliar Rupiah)		-	-	-	-	-	-	-	208,0		211,8		419,8	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPIAAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.	TARGET
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									-	-	-	-	-	-	-	171,9	-	175,1	-	347,0	
								9 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bojonegoro (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								10 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tuban (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	177,5	-	180,8	-	358,3
								11 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lamongan (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	189,6	-	193,1	-	382,7
								12 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ngawi (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	112,7	-	114,8	-	227,5
								13 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Madiun (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	183,1	-	186,5	-	365,6
								14 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Magetan (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	111,5	-	113,5	-	225,0
								15 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ponorogo (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	141,2	-	143,9	-	285,1
								16 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pacitan (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	48,6	-	49,5	-	98,1
								17 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Kediri (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	373,8	-	380,7	-	754,5
								18 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tulungagung (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	239,5	-	244,0	-	483,5
								19 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Trenggalek (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	92,1	-	93,8	-	185,9
								20 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Nganjuk (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	158,1	-	161,1	-	319,2
								21 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Kota (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	380,3	-	387,4	-	761,7
								22 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Selatan (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	236,6	-	241,0	-	477,6

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									-	-	-	-	-	-	-	244,4	248,9		493,3	
							23	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Mahasiswa dan Batu Kota (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	244,4	248,9		493,3	
							24	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bitar (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	264,8	269,8		534,6	
							25	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Probolinggo (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	171,1	174,3		345,4	
							26	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lumajang (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	120,2	122,4		242,6	
							27	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pasuruan (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	283,0	288,3		571,3	
							28	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Situbondo (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	65,4	66,7		132,1	
							29	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jember (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	259,3	264,1		523,4	
							30	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bondowoso (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	59,4	60,5		119,9	
							31	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Banyuwangi (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	284,3	289,6		573,9	
							32	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pamekasan (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	74,8	76,2		151,0	
							33	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bangkalan (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	74,2	75,5		149,7	
							34	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sampang (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	43,8	44,6		88,4	
							35	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sumenep (Miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	67,1	68,4		135,5	



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERIA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERIA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD				
									2015					2016					2017				
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
									-	-	-	-	-	-	-	6 layanan	1.310.600.482	6 layanan	1.441.734.213	6 layanan	2.752.334.695		
				3.07.057.009	1	Penyelenggaran Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah																
				3.07.057.010	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan									1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat			
				3.07.057.011	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah									12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000		
				3.07.057.012	4	Penyelenggaran Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah									2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000		
				3.07.057.012	4	Penyelenggaran Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat	2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat									2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen			
				3.07.057.013	1	Penyelenggaran Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Utara	1 Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama									96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000		
				3.07.057.013	1	Penyelenggaran Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Utara	2 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah									7 layanan	1.310.600.482	7 layanan	1.441.734.213	7 layanan	2.752.334.695		
				3.07.057.014	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Utara	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah									1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat			
				3.07.057.015	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Utara	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah									12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000		
				3.07.057.015	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Utara	2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat									2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
			3.07.057.016	4	Penyelenggaran Operasi Bersama di UPT Surabaya Utara	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	8 layanan	1.310.600.482	8 layanan	1.441.734.213	8 layanan	2.752.334.695
			3.07.057.017	1	Penyelenggaran Operasional Layanan Publik di UPT Mojokerto	1 Jumlah Penyelenggaran Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
			3.07.057.018	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Mojokerto	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
			3.07.057.019	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Mojokerto	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
			3.07.057.020	4	Penyelenggaran Operasi Bersama di UPT Mojokerto	2 Jumlah Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama		-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
			3.07.057.021	1	Penyelenggaran Operasional Layanan Publik di UPT Sidoarjo	1 Jumlah Penyelenggaran Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	11 layanan	1.876.879.244	11 layanan	2.063.490.559	11 layanan	3.940.369.803
			3.07.057.022	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sidoarjo	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	2 sertifikat		2 sertifikat		4 sertifikat	
			3.07.057.023	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sidoarjo	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
						1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			-	-	-	-	-	-	4 dokumen		4 dokumen		8 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
			3.07.057.024	4	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sidoarjo	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
			3.07.057.025	1	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Gresik	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	9 layanan	1.310.600.482	9 layanan	1.441.734.213	9 layanan	2.752.334.695
			3.07.057.026	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Gresik	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
			3.07.057.027	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Gresik	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
			3.07.057.028	4	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Gresik	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
			3.07.057.029	1	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jombang	2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
			3.07.057.030	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jombang	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
			3.07.057.031	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jombang	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	8 layanan	1.310.600.482	8 layanan	1.441.734.213	8 layanan	2.752.334.695
						2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
						1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
						1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD							
									2015					2016					2017			2018				
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
						3.07.057.032	4 Penyelenggaran Operasi Bersama di UPT Jombang	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	-	-	-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000				
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 layanan	1.310.600.482	10 layanan	1.441.734.213	10 layanan	2.752.334.695			
									1	Penyelenggaran Operasional Layanan Publik di UPT Bojonegoro	1 Jumlah Penyelenggaran Pelayanan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	1 sertifikat	-	1 sertifikat	-	2 sertifikat	-			
									2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bojonegoro	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000			
									3.07.057.034	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bojonegoro	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000			
									3.07.057.035	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bojonegoro	2 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000			
									3.07.057.036	4 Penyelenggaran Operasi Bersama di UPT Bojonegoro	2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000			
									3.07.057.037	1 Penyelenggaran Operasional Layanan Publik di UPT Tuban	1 Jumlah Penyelenggaran Pelayanan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	7 layanan	1.310.600.482	7 layanan	1.441.734.213	7 layanan	2.752.334.695			
									3.07.057.038	2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tuban	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	-	-	-	-	-	-	1 sertifikat	-	1 sertifikat	-	2 sertifikat	-			
									3.07.057.039	3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tuban	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000			
									1	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000				
									2	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	4 dokumen	-				

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERIA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERIA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD						
									2015					2016					2017						
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
									-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000					
				3.07.057.040	4	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tuban	1 Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama		-	-	-	-	-	-	8 layanan	1.310.600.482	8 layanan	1.441.734.213	8 layanan	2.752.334.695					
					3.07.057.041	1	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lamongan	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah		-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat						
					3.07.057.042	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lamongan	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan		-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000					
					3.07.057.043	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lamongan	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah		-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000					
					3.07.057.044	4	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lamongan	2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen						
					3.07.057.045	1	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ngawi	1 Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama		-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000					
					3.07.057.046	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ngawi	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah		-	-	-	-	-	6 layanan	1.876.879.244	6 layanan	2.063.490.559	6 layanan	3.940.369.803					
					3.07.057.047	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ngawi	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan		-	-	-	-	-	2 sertifikat		2 sertifikat		4 sertifikat						
									-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000						
									-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000						
									-	-	-	-	-	4 dokumen		4 dokumen		8 dokumen							

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD								
									2015					2016					2017			2018			2019		
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
									-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000							
			3.07.057.048	4	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	8 layanan	1.876.879.244	8 layanan	2.063.490.559	8 layanan	3.940.369.803							
			3.07.057.049	1	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Madin	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	2 sertifikat		2 sertifikat		4 sertifikat								
			3.07.057.050	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Madin	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000							
			3.07.057.051	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Madin	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000							
			3.07.057.052	4	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Madin	2 Jumlah Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			-	-	-	-	-	-	4 dokumen		4 dokumen		8 dokumen								
			3.07.057.053	1	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Magetan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000							
			3.07.057.054	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Magetan	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	5 layanan	1.310.600.482	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.334.695							
			3.07.057.054	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Magetan	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat								
			3.07.057.055	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Magetan	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000							
			3.07.057.056	4	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Magetan	2 Jumlah Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000							
						Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000							

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERIA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERIA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD				
									2015					2016					2017				
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
									-	-	-	-	-	-	-	6 layanan	1.310.600.482	6 layanan	1.441.734.213	6 layanan	2.752.334.695		
			3.07.057.057	1	Penyelenggaran Operasional Layanan Publik di UPT Ponorogo	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat			
			3.07.057.058	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ponorogo	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000		
			3.07.057.059	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ponorogo	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000		
			3.07.057.060	4	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ponorogo	2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000		
			3.07.057.061	1	Penyelenggaran Operasional Layanan Publik di UPT Pacitan	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	-	4 layanan	1.310.600.482	4 layanan	1.441.734.213	4 layanan	2.752.334.695		
			3.07.057.062	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pacitan	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat			
			3.07.057.063	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pacitan	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000		
						2 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000		
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2015		2016		2017		2018		2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									-	-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
									-	-	-	-	-	-	-	11 layanan	1.876.879.244	11 layanan	2.063.490.559	11 layanan	3.940.369.803
									-	-	-	-	-	-	-	3 sertifikat		3 sertifikat		6 sertifikat	
									-	-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
									-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
									-	-	-	-	-	-	-	6 dokumen		6 dokumen		12 dokumen	
									-	-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
									-	-	-	-	-	-	-	6 layanan	1.310.600.482	6 layanan	1.441.734.213	6 layanan	2.752.334.695
									-	-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
									-	-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPIAAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERIA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERIA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD				
									2015					2016					2017				
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
									-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000		
			3.07.057.071	3	Pendaftaran Objek Pajak Daerah di UPT Tulungagung	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000		
			3.07.057.072	4	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tulungagung	2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama		-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen				
			3.07.057.073	1	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Trenggalek	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	-	6 layanan	1.310.600.482	6 layanan	1.441.734.213	6 layanan	2.752.334.695		
			3.07.057.074	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Trenggalek	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	-	1 sertifikat	1 sertifikat	1 sertifikat	2 sertifikat				
			3.07.057.075	3	Pendaftaran Objek Pajak Daerah di UPT Trenggalek	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000		
			3.07.057.076	4	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Trenggalek	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000		
			3.07.057.077	1	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Nganjuk	2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama		-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen				
			3.07.057.078	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Nganjuk	1 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	-	5 layanan	1.310.600.482	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.334.695		
			3.07.057.079	3	Pendaftaran Objek Pajak Daerah di UPT Nganjuk	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000		
						2 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000		
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen				

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
									-	-	-	-	-	-	5 layanan	1.310.600.482	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.334.695
									-	-	-	-	-	-	1 sertifikat	-	1 sertifikat	-	2 sertifikat	-
									-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
									-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
									-	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	4 dokumen	-
									-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
									-	-	-	-	-	-	5 layanan	1.310.600.482	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.334.695
									-	-	-	-	-	-	1 sertifikat	-	1 sertifikat	-	2 sertifikat	-
									-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
									-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
									-	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	4 dokumen	-

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERIA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERIA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD				
									2015					2016					2017				
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
									-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000			
			3.07.057.088	4	Penyelenggaran Operasi Bersama di UPT Malang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	7 layanan	1.876.879.244	7 layanan	2.063.490.559	7 layanan	3.940.369.803			
			3.07.057.089	1	Penyelenggaran Operasional Layanan Publik di UPT Malang Utara dan Batu Kota	1 Jumlah Penyelenggaran Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	2 sertifikat		2 sertifikat		4 sertifikat				
			3.07.057.090	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000			
			3.07.057.091	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000			
			3.07.057.092	4	Penyelenggaran Operasi Bersama di UPT Malang Utara dan Batu Kota	2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama		-	-	-	-	-	-	4 dokumen		4 dokumen		8 dokumen				
			3.07.057.093	1	Penyelenggaran Operasional Layanan Publik di UPT Blitar	1 Jumlah Penyelenggaran Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	7 layanan	1.876.879.244	7 layanan	2.063.490.559	7 layanan	3.940.369.803			
			3.07.057.094	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Blitar	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	2 sertifikat		2 sertifikat		4 sertifikat				
			3.07.057.095	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Blitar	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000			
						1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000			
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			-	-	-	-	-	-	4 dokumen		4 dokumen		8 dokumen				

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
			3.07.057.096	4	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Blitar	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	7 layanan	1.876.879.244	7 layanan	2.063.490.559	7 layanan	3.940.369.803
			3.07.057.097	1	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Probolinggo	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	2 sertifikat		2 sertifikat		4 sertifikat	
			3.07.057.098	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Probolinggo	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
			3.07.057.099	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Probolinggo	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
			3.07.057.100	4	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Probolinggo	2 Jumlah Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama		-	-	-	-	-	-	4 dokumen		4 dokumen		8 dokumen	
			3.07.057.101	1	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lumajang	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	6 layanan	1.310.600.482	6 layanan	1.441.734.213	6 layanan	2.752.334.695
			3.07.057.102	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lumajang	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
			3.07.057.103	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lumajang	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
						1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						3.07.057.104	4 Penyelenggaran Operasi Bersama di UPT Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
									-	-	-	-	-	-	8 layanan	1.876.879.244	8 layanan	2.063.490.559	8 layanan	3.940.369.803
									1 Jumlah Penyelenggaran Operasional Layanan Publik	1 Jumlah Penyelenggaran Pelayanan Pajak Daerah	-	-	-	-	2 sertifikat	-	2 sertifikat	-	4 sertifikat	-
									2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pasuruan	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
									3 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pasuruan	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
									4 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pasuruan	2 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	8 dokumen	-
									5 Penyelenggaran Operasi Bersama di UPT Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
									6 Penyelenggaran Operasi Bersama di UPT Situbondo	1 Jumlah Penyelenggaran Pelayanan Pajak Daerah	-	-	-	-	4 layanan	1.310.600.482	4 layanan	1.441.734.213	4 layanan	2.752.334.695
									7 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Situbondo	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	-	-	-	-	1 sertifikat	-	1 sertifikat	-	2 sertifikat	-
									8 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Situbondo	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
									9 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Situbondo	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
									10 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	4 dokumen	-

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						3.07.057.112	4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Situbondo	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
									-	-	-	-	-	-	8 layanan	1.310.600.482	8 layanan	1.441.734.213	8 layanan	2.752.334.695
									1 Jumlah Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jember	1 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	-	-	-	-	2 sertifikat	-	2 sertifikat	-	4 sertifikat	-
									2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jember	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
									3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jember	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
									2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	8 dokumen	-
									4 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jember	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
									1 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bondowoso	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	-	-	-	-	5 layanan	1.310.600.482	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.334.695
									2 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bondowoso	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	-	-	-	-	1 sertifikat	-	1 sertifikat	-	2 sertifikat	-
									1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
									3 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bondowoso	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
									2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	4 dokumen	-

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
			3.07.057.120	4	Penyelenggaran Operasi Bersama di UPT Bondowoso	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	9 layanan	1.876.879.244	8 layanan	2.063.490.559	8 layanan	3.940.369.803
			3.07.057.121	1	Penyelenggaran Operasional Layanan Publik di UPT Banyuwangi	1 Jumlah Penyelenggaran Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	2 sertifikat		2 sertifikat		4 sertifikat	
			3.07.057.122	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Banyuwangi	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
			3.07.057.123	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Banyuwangi	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
			3.07.057.124	4	Penyelenggaran Operasi Bersama di UPT Banyuwangi	2 Jumlah Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama		-	-	-	-	-	-	4 dokumen		4 dokumen		8 dokumen	
			3.07.057.125	1	Penyelenggaran Operasional Layanan Publik di UPT Pamekasan	1 Jumlah Penyelenggaran Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	5 layanan	1.310.600.482	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.334.695
			3.07.057.126	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pamekasan	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
			3.07.057.127	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pamekasan	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
						1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
						2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERIA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERIA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.07.057.128	4	Penyelenggaran Operasi Bersama di UPT Pamekasan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama		-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
				3.07.057.129	1	Penyelenggaran Operasional Layanan Publik di UPT Bangkalan	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah		-	-	-	-	-	-	6 layanan	1.310.600.482	6 layanan	1.441.734.213	6 layanan	2.752.334.695
				3.07.057.130	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bangkalan	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan		-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		2 sertifikat	
				3.07.057.131	3	Pendaftaran Objek Pajak Daerah di UPT Bangkalan	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah		-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000
				3.07.057.132	4	Penyelenggaran Operasi Bersama di UPT Bangkalan	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Objek Pajak dan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000
				3.07.057.133	1	Penyelenggaran Operasional Layanan Publik di UPT Sampang	2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen	
							1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah		-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000
							2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan		-	-	-	-	-	-	3 layanan	1.310.600.482	3 layanan	1.441.734.213	3 layanan	2.752.334.695

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERIA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERIA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD						
									2015					2016					2017						
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	KONDISI KINERIA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
									-	-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	90.000.000				
			3.07.057.134	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sampang	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000				
			3.07.057.135	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sampang	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000				
			3.07.057.136	4	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sampang	2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama		-	-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000				
			3.07.057.137	1	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sumenep	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah			-	-	-	-	-	-	-	5 layanan	1.310.600.482	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.334.695				
			3.07.057.138	2	Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sumenep	2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah		-	-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat	2 sertifikat						
			3.07.057.139	3	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sumenep	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah			-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000				
			3.07.057.140	4	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sumenep	2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama		-	-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	192 dokumen	80.000.000				

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPIAAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4. Persentase Tingkat Keputuhan Wajib Pajak	3.07.054	VI	Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah		Percentase Layanan yang Bersertifikat		88,63%	88%	-	88%	-	86%	-	86%	-	86%	-	86%	-
									-	-	-	-	-	-	91%	4.238.943.037	92%	4.654.226.698	92%	8.893.169.735
		3.07.054.001	1	Pelaksanaan Audit dan Sertifikasi / Standarisasi Layanan	Jumlah Dokumen Sertifikasi			88,00	88,00	-	88,00	-	86,00	-	86,00	-	86,00	-	86,00	-
									-	-	-	-	-	-	3 dokumen /sertifikat	1.311.717.012	3 dokumen /sertifikat	1.440.224.198	6 dokumen /sertifikat	2.751.941.210
	5. Rata-Rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	3.07.054.002	2	Sosialisasi Hasil Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi			88,00	88,00	-	88,00	-	86,00	-	86,00	-	86,00	-	86,00	-
									-	-	-	-	-	-	3 dokumen	2.927.226.025	3 dokumen	3.214.002.500	6 dokumen	6.141.228.525
		3.07.055	VII	Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah		1. Percentase Penurunan Temuan SPI		88,00	88,00	-	88,00	-	86,00	-	86,00	-	86,00	-	86,00	-
									-	-	-	-	-	-	7,5%	3.832.274.255	5,0%	4.207.717.111	5,0%	8.039.991.366
		3.07.055.001	1	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Kegiatan Monitoring Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			88,00	88,00	-	88,00	-	86,00	-	86,00	-	86,00	-	86,00	-
									-	-	-	-	-	-	2 dokumen	374.999.927	2 dokumen	411.738.176	4 dokumen	786.738.103
		3.07.055.002	2	Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah	2. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja			88,00	88,00	-	88,00	-	86,00	-	86,00	-	86,00	-	86,00	-
									-	-	-	-	-	-	70 dokumen	1.728.637.165	70 dokumen	1.897.989.468	140 dokumen	3.626.626.633
		3.07.055.004	4	Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian (LHP) Administrasi			88,00	88,00	-	88,00	-	86,00	-	86,00	-	86,00	-	86,00	-
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian (LHP) Pendapatan Daerah										70 dokumen	1.728.637.163	70 dokumen	1.897.989.467	140 dokumen	3.626.626.630

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPIAAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2015		2016		2017		2018		2019				
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6. Persentase Wajib Pajak yang Memerlukan Layanan Samsat Unggulan						5.354.364	43%		43%		43%		52%		52%		52%		
			3.07.056	VIII	Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan		Lama Gangguan Operasional Pelayanan Di Seluruh Jawa Timur (jam/tahun)								38	2.792.090.045	36	3.065.627.426	36	5.857.717.471	
			3.07.056.001	1	Sinergitas Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Pihak Perbankan dan Penyedia Jasa Teknologi Informasi									2 dokumen	60.001.935	2 dokumen	65.880.246	4 dokumen	125.882.181	
			3.07.056.002	2	Workshop Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek Sumberdaya Aparatur Bidang Teknologi Informasi									4 dokumen	200.006.450	4 dokumen	219.600.818	8 dokumen	419.607.268	
			3.07.056.003	3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administrasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	1 Jumlah pemeliharaan jaringan 2 Jumlah pengadaan sarana pendukung									18 paket	2.532.081.660	18 paket	2.780.146.362	36 paket	5.312.228.022	
			1.20.01	IX	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan perkantoran		100%	100%	51.703.436.866	100%	68.116.361.050	100%	72.654.143.550	100%	0	100%	0	100%	192.473.941.466
			1.20.01.001	a.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	- Jumlah Surat Perjalanan yang tersedia	peringkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran		8.800.000 obyek	27.800.000 surat	51.703.436.866	28.800.000 surat	68.116.361.050	51.140.000 surat	72.654.143.550					107.740.000 surat	192.473.941.466

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPIAAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD				
									2015		2016		2017		2018		2019						
	1	2	3	4	5	6	7	8	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	19	20	21		
				3.07.01	X Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor										100%	51.765.940.863	100%	56.837.381.846	100%	108.603.322.709
				3.07.01.001	a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran		peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran										100%	51.765.940.863	100%	56.837.381.846	100%	108.603.322.709
				3.07.03	XI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Prosentase sarana dan prasarana aparaturnya yang layak fungsi	100%	100%	64.302.597.996	100%	70.800.615.511	100%	77.629.165.450	100%	50.210.835.199	100%	55.129.924.531	100%	318.073.138.687		
				3.07.02.012	a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Yang Tersedia		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparaturnya yang layak fungsi	96 lokasi	96 lokasi	50.149.762.270	96 lokasi	35.033.737.621	96 lokasi	38.236.592.200	50 paket	27.151.136.251	50 paket	29.811.097.276	100 paket	180.382.325.618		
				3.07.02.031	b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparaturnya yang layak fungsi	96 lokasi	96 lokasi	14.152.835.726	96 lokasi	35.766.877.890	96 lokasi	39.392.573.250	96 paket	23.059.698.948	96 paket	25.318.827.255	192 paket	137.690.813.069		
				3.07.07	XII Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah			Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	100%	1.632.738.646	100%	3.662.874.000	100%	6.816.924.000	100%	26.312.753.451	100%	28.890.579.218	100%	67.315.869.315		
				1.20.07.001	a Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan		tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien	90 orang	195 kegiatan	1.632.738.646	2440 kegiatan	3.662.874.000	2440 kegiatan	6.816.924.000					4380 orang	12.112.536.646		
				3.07.07.001	b Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah konsultasi		tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien										90 kali	6.312.753.109	90 kali	6.931.205.209	180 kali	13.243.958.318

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPIAAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD							
									2015		2016		2017		2018		2019									
	1	2	3	4	5	6	7	8	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	10	21						
									1.20.07.002	c Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis	tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien	850	850 orang	30.617.862.067,00	850 orang	11.886.618.000,00	850 orang	8.193.675.000	850 orang					2550 orang	50.698.155.067
									3.07.07.002	d Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien								50 pegawai	20.000.000,342	50 pegawai	21.959.374.009	100 pegawai	41.959.374.351	
									3.07.08	XIII Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	persentase dokumen penyelenggaran pemerintahan yang disusun tepat waktu		100%	100%	907.414.840	100%	1.426.617.000	100%	1.815.988.000	100%	1.466.943.114	100%	1.697.506.781	100%	7.314.469.735
									3.07.08.001	a Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	terpenuhinya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		8 dokumen	7 dokumen	366.652.490	7 dokumen	487.912.000	7 dokumen	805.478.000	6 dokumen	500.006.705	7 dokumen	617.887.415	34 dokumen	2.777.936.610
									3.07.08.002	b Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Evaluasi yang tersusun	terpenuhinya dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu		3 dokumen	4 dokumen	327.802.350	4 dokumen	684.545.000	4 dokumen	724.180.000	8 dokumen	430.603.849	7 dokumen	543.286.806	27 dokumen	2.710.418.005
									1.20.08.003	c Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Tersusunnya Sistem Informasi Data yang Termutakhir	Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir		100%	1 sistem	212.960.000	1 sistem	254.160.000	1 sistem	286.330.000					1 sistem	753.450.000
									3.07.08.003	d Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah update database perangkat daerah	Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir								4 kali	286.332.560	4 kali	286.332.560	8 kali	572.665.120	
									3.07.08.004	e Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	terpenuhinya dokumen laporan pengelolaan keuangan yang disusun tepat waktu								13 dokumen	250.000.000	13 dokumen	250.000.000	26 dokumen	500.000.000	



